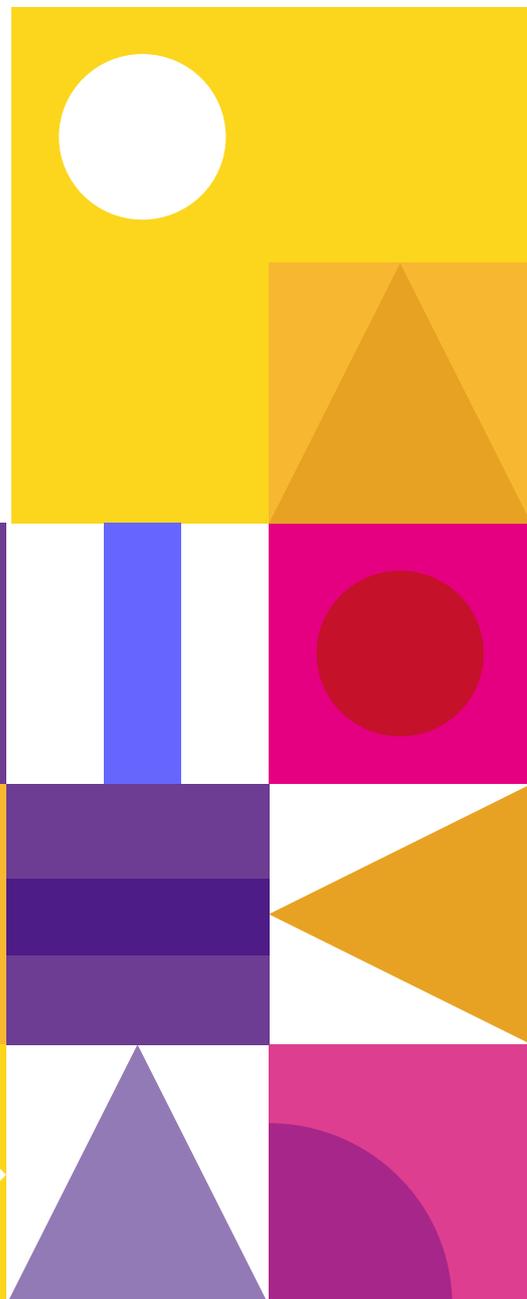




**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

# LAKIP 2023



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atas pencapaian kinerja tahun 2023 terhadap Perjanjian Kinerja di awal tahun.

Penyusunan LAKIP Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dalam rangka memenuhi kewajiban yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kumperindag dalam satu periode.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi dinas Kumperindag dalam pengambilan kebijakan, serta dapat bermanfaat dalam penyusunan arah strategi yang lebih baik di masa yang akan datang, dan dapat menjadi landasan untuk penyusunan LAKIP ditahun selanjutnya.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta kerjasamanya dalam penyusunan LAKIP Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini.

Gorontalo, Februari 2023  
Kepala Dinas Kumperindag  
Provinsi Gorontalo

**RISJON SUNGE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196909241989021001

## **Ikhtisar Eksekutif**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023- 2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran yaitu :

**a. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan indicator kinerja Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 4,5 persen dari target 5,67 persen dengan capaian 79,37persen. Indikator Pertumbuhan Ekonomi ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 21,22 persen dan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 96,61persen dan di tahun 2019 sebesar 13,2 persen. Adapun capaian dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo jika dibandingkan dengan target RPD pada tahun 2023 ini mencapai 79,37persen dengan kriteria tinggi dan jika dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2023 sebesar 90persen dengan kriteria tinggi.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan menjadi 5,05persen sedikit melebihi proyeksi pemerintah sebesar 5persen, tetapi tetap menunjukkan ketahanan yang signifikan dalam konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor.

Solusi yang dilakukan pemerintah daerah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi agar dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

Gorontalo tahun 2023 adalah mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, stimulus bagi UMKM, meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan mutu dan keamanan produk pangan serta menggerakkan roda ekonomi di daerah. Pemprov Gorontalo juga terus mendorong investasi untuk mengelola potensi daerah di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi daerah dan nasional serta kemudahan investasi di daerah.

#### **b. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja Laju Inflasi**

Target inflasi Provinsi Gorontalo yang ditetapkan sebesar 4-5persen dengan realisasi sebesar 3,88persen, tingkat capaian sebesar 103,89persen. Capaian Laju Inflasi ditahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 134,62persen. capaian inflasi tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2019 hingga 2022 terus mengalami kenaikan. Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 134,62 persen, Begitupun di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 36,13 persen dan tahun 2019 sebesar 31,83persen.

Capaian ini jika dibandingkan dengan dokumen perencanaan RPD adalah 103,09 persen yaitu dari target sebesar 4-5 persen dengan realisasinya sebesar 3,88 persen. Capaian dari indikator kinerja laju inflasi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2023 ini capaian kinerjanya sebesar 129,34 persen dengan kriteria sedang dengan realisasi 3,88 persen dari standar nasional  $3 \pm 1$ . pencapaian inflasi Indonesia tahun 2023 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran  $3 \pm 1$  persen. Capaian inflasi tahun 2023 tersebut tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022, yakni sebesar 5,51 persen (yoy)

Inflasi terjadi karna adanya kenaikan harga yang ditunjukkan olh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minumam dan tembakau.

Adapun beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah provinsi Gorontalo dalam menekan Inflasi yaitu adanya komitmen dari pemerintah daerah yang terlihat intensitas kehadiran penjabat gubernur dalam setiap High Level Meeting (HLM)

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai respon terhadap situasi inflasi yang meningkat. dan pelaksanaan operasi pasar murah khususnya untuk komoditi cabai, bawang merah, minyak goreng, beras serta komoditi lainnya (sesuai juknis) yang menjadi penyumbang utama inflasi. Selain gelar pasar murah di Kabupaten/Kota, Pemprov Gorontalo menggelar pasar murah cabai dan tomat di Pasar Sentral Kota Gorontalo sebanyak 4 kali dalam waktu 4 hari. Pasar murah ini menjual Cabai Rawit dan Tomat yang telah disubsidi, yaitu Cabai Rawit sebanyak 3.150 Kilogram dan Tomat sebanyak 2000 Kilogram. Pedagang di Pasar Sentral menjual cabai yang telah disubsidi tersebut dengan harga Rp.15.000 perkilogram, (yang dikemas Rp.3000/200 gram/orang), dari harga jual cabai pada saat itu Rp.140 ribu per kilogram, Sedangkan tomat yang telah disubsidi dijual dengan harga Rp.5 ribu/kilogram, yang dikemas Rp.2500/250 gram/orang), dari harga jual tomat saat itu Rp.30.000/kilogram

TPID Provinsi Gorontalo juga intens mengkampanyekan belanja bijak kepada masyarakat. Yang bertujuan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan dan imbauan agar pedagang tidak menaikkan harga barang terlebih menjelang natal dan tahun baru. Upaya ini diharapkan dapat meredakan tekanan inflasi dan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga bahan pokok di Gorontalo

### **c. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP**

Capaian indikator nilai sakiip Dinas Kumperindag provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 105,25%, dari target 74,5% dan realisasi 78,41%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. capaian indikator sasaran strategis di tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 telah mencapai target yang telah ditetapkan sebanyak 105,25persen dari target 74,5persen dan realisasi 78,41persen. Dan bila

dibandingkan dengan standar nasional telah mencapai 90,40persen dari target yang telah ditetapkan sebanyak 70,88persen. dan realisasi 78,41persen.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa rata-rata nilai SAKIP Tahun 2023 pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75 pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68. Sementara untuk RB, rata-rata nilai nasional meningkat, dengan rincian 75,65 dari sebelumnya 74,93 untuk kementerian/lembaga, 65,63 dari sebelumnya 64,28 untuk pemerintah provinsi, serta 54,44 dari sebelumnya 53,85 untuk pemerintah kabupaten/kota.

SAKIP adalah alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kickoff perbaikan SAKIP dengan menghadirkan seluruh pimpinan OPD, melakukan identifikasi OPD yang mendukung enam program unggulan provinsi, menyempurnakan rumusan indikator kinerja utama pada level OPD, menyusun pedoman akuntabilitas kinerja, memperbaiki laporan kinerja, meningkatkan kapasitas evaluator internal SAKIP serta mendorong komitmen pimpinan yang akan menjadi penentu keberhasilan SAKIP.

#### **d. Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) dengan indikator kinerja Jumlah Koperasi Berkualitas**

Adapun target jumlah koperasi berkualitas tahun 2023 sebesar 20 UKM dengan realisasi sebesar 22 UKM. Sehingga capaian jumlah koperasi berkualitas sebesar 110%. Capaian indikator koperasi berkualitas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69

Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja jumlah koperasi berkualitas tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 sebesar 110% yaitu dengan target 20 koperasi dan realisasi 22 koperasi. Dimana untuk koperasi berkualitas berdasarkan pemeringkatan. Aspek pemeringkatannya yaitu kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat koperasi terhadap anggota, manfaat koperasi terhadap masyarakat. Dengan hasil pemeringkatan sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas.

Jumlah koperasi berkualitas realisasi tahun 2023 sebanyak 22 koperasi dan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional.

Target yang diharapkan dapat tercapai dengan mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perkoperasian yang diberikan secara berkala kepada setiap koperasi yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Pembinaan koperasi lebih menitikberatkan kepada koperasi yang telah memperoleh penguatan modal di tahun 2022, sehingga pemanfaatan sesuai peruntukannya dan pencatatanya sesuai sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong bertambahnya koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). Kedepan semakin banyak koperasi yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) serta mengurus izin usaha koperasi sesuai usaha atau KBLI (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) yang ada di anggaran dasar koperasi sebagai salah satu legalitas usaha, serta Mendorong transformasi koperasi modern di Gorontalo.

**e. Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) dengan indikator kinerja Jumlah UKM yang berdaya saing**

Capaian jumlah UKM yang Berdaya saing 83,34% dengan realisasi 50 UKM dari target 60 UKM. Indikator UKM yang berdaya saing antara lain adanya peningkatan produktifitas, peningkatan pangsa pasar serta pertumbuhan output. UKM ini telah mengikuti kurasi produk yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan Bank Indonesia. UKM yang berdaya saing dilihat dari aspek produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan

pertumbuhan output. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 sebesar 83,34% dengan target 60 UKM dan realisasi 50 UKM. Tahun 2023 ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional dimana pada Renstra Kemenkop 2020-2024 tidak mencantumkan indikator UKM yang berdaya saing.

UKM yang berdaya saing dapat dilihat dari sisi produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output.

Pencapaian diharapkan dapat terus bertahan dengan terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada UKM melalui coaching clinic dan mentoring bagi UMKM. stimulan bagi UMKM, Peningkatan SDM bagi pelaku UMKM melalui E-commerce, marketplace. Peningkatan kualitas dan kontinuitas UMKM melalui kegiatan advokasi/Bimtek/Workshop.

**f. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah**

Di tahun 2023 realisasi -36,34% dari target 0,78% . Indikator kinerja urusan industri Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah tahun 2023 diperoleh dari :

$$\frac{(\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri thn } n-1)}{(\text{Jumlah Industri Tahun } n-1)} \times 100\%$$

Dimana :

Jumlah industri tahun 2023 = 10.039 3IKM

Jumlah industri tahun 2022 = 15.767 IKM

jumlah IKM 2023 berdasarkan data SIIDIG per 18 Januari 2023. Data jumlah industri tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 karena masih terdapat beberapa Kabupaten yang belum melakukan inputan data IKM pada aplikasi

SIIDG hingga 18 Januari 2023, antara lain Kabupaten Pohuwato sehingga capaian untuk indikator sasaran ini tidak mencapai target

Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah - 4758,98%. indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan industri kecil menengah jika dibandingkan dengan target Renstra 2023-2026 yaitu -101,34 %. dengan realisasi tahun 2023 sebesar -34,33 %..

Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam mengembangkan IKM yaitu melalui pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas, penyerapan tenaga kerja, memanfaatkan potensi bahan baku lokal. Peningkatan mutu produk melalui program peningkatan sumber daya manusia IKM melalui bimtek peningkatan mutu produk, sertifikasi halal, PIRT serta stimulan bantuan bagi IKM.

**g. Meningkatkan Nilai Ekspor (USD) dengan indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor.**

Jumlah Nilai Ekspor Tahun 2023 berjumlah \$37.959.205 data ini diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan Bea Cukai Gorontalo. Komoditi Export 2023 yaitu Ikan tuna, molases, santan beku, jagung, wood pelet, briket, minyak mentah.

Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor 269 %. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor jika dibandingkan dengan dokumen

Renstra 2023-2026 adalah sebesar 269 %, dimana target renstra \$14.102.573 dengan realisasi \$37.959.20. dari capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor sebesar 0,01 % jika dibandingkan dengan standar nasional \$258,82 (milyar) dan realisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebanyak \$37.959.205.

Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar USD 258,82 miliar, sedikit dibawah capaian ekspor tahun 2022 sebesar USD 291,90 miliar.

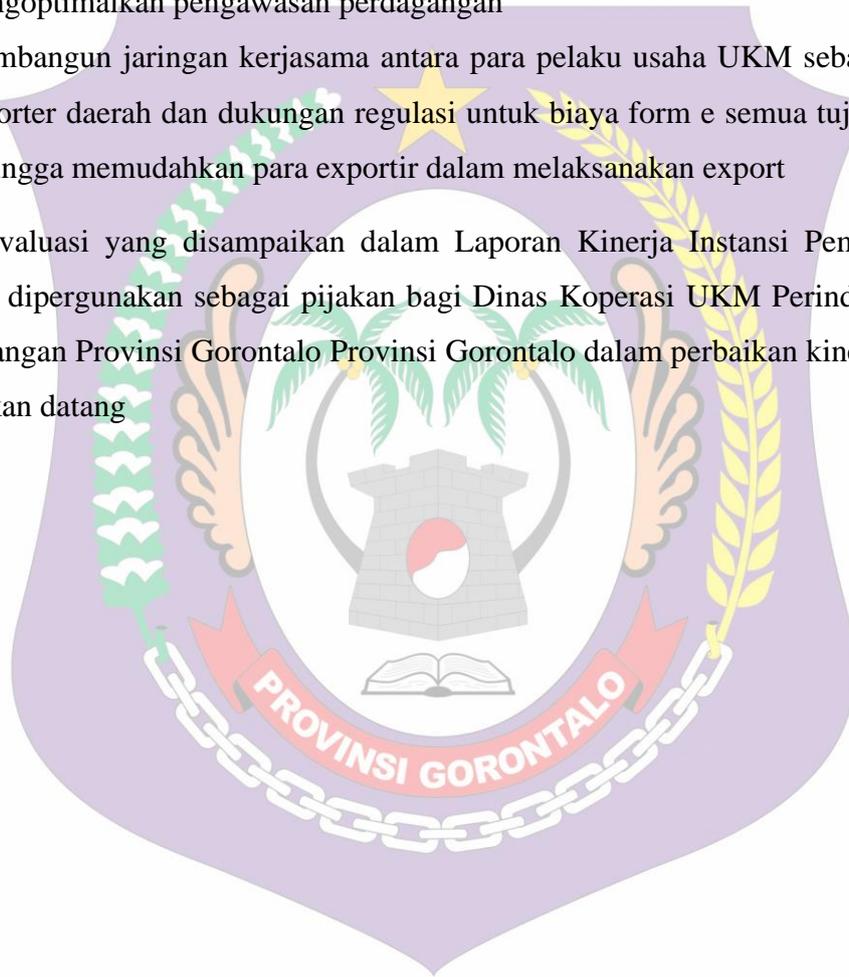
Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah ekspor yaitu meningkatkan promosi produk-produk lokal agar tingkat permintaan terhadap produk lokal unggulan semakin banyak. Alternatif solusi untuk meningkatkan promosi produk lokal seperti mengadakan pameran dagang (ITEI), memberi kemudahan para produsen barang ekspor yang hendak menjual produknya ke pasar internasional. Kemudahan yang diberikan pemerintah adalah mengurus perizinan dagang dan menyediakan fasilitas produksi berupa pelatihan inovasi produk. Dengan kemudahan tersebut pengusaha bisa menekan harga jualnya sehingga barang yang diproduksi mampu bersaing di pasar internasional, memilih komoditas ekspor unggulan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo ke depan, sebagai berikut:

1. Melakukan sinergi dengan para pelaku pembangunan sector ekonomi lainnya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.
2. Mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perkoperasian yang diberikan secara berkala kepada setiap koperasi yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo
3. mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembinan dan pendampingan kepada UKM melalui coaching clinic dan mentoring bagi UMKM. stimulan bagi UMKM, Peningkatan SDM bagi pelaku UMKM melalui E-commerce, marketplace. Peningkatan kualitas dan kontinuitas UMKM melalui kegiatan advokasi/Bimtek/Workshop

4. pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas, penyerapan tenaga kerja, memanfaatkan potensi bahan baku lokal. Peningkatan mutu produk melalui program peningkatan sumber daya manusia IKM melalui bimtek peningkatan mutu produk, sertifikasi halal, PIRT serta stimulan bantuan bagi IKM
5. Peningkatan sarana dan prasarana bagi para UKM/IKM
6. Memaksimalkan kerjasama dan jalinan kemitraan dengan swasta
7. meningkatkan promosi produk-produk lokal
8. mengoptimalkan pengawasan perdagangan
9. Membangun jaringan kerjasama antara para pelaku usaha UKM sebagai calon exporter daerah dan dukungan regulasi untuk biaya form e semua tujuan export sehingga memudahkan para exportir dalam melaksanakan export

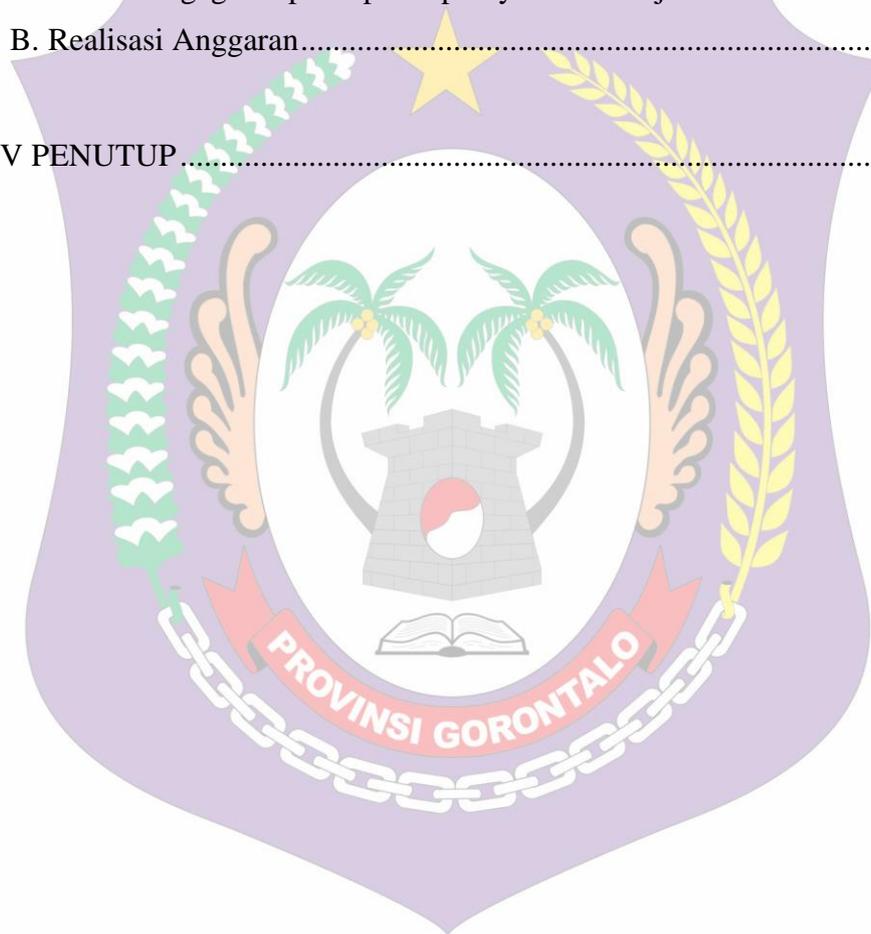
Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo dalam perbaikan kinerja ditahun yang akan datang



## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i       |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....   | ii      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | vii     |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | ix      |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | xi      |
| <b>BABI. PENDAHULUAN</b> .....  | 1       |
| A. Latar Belakang .....   | 1       |
| B. Landasan Hukum .....   | 2       |
| C. Tujuan .....   | 4       |
| D. Gambaran Umum OPD.....   | 4       |
| E. Isu-Isu Strategis Organisasi.....  | 15      |
| F. Keadaan Pegawai .....  | 19      |
| G. Sarana Prasarana Kantor .....  | 24      |
| H. Sistematika Penyusunan LAKIP.....  | 31      |
| <b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....  | 33      |
| A. Rencana Strategis .....  | 33      |
| 1. Visi dan Misi Kepala Daerah .....  | 34      |
| 2. Tujuan Perangkat Daerah .....  | 37      |
| 3. Sasaran Strategis.....   | 38      |
| 4. Strategi dan Arah Kebijakan .....  | 38      |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....  | 45      |
| C. Rencana Anggaran Tahun 2023 .....  | 46      |
| D. Instrumen Pendukung.....   | 51      |
| <b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....   | 57      |
| A. Capaian Kinerja Diskumperindag Prov. Gorontalo .....                                 | 57      |
| 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023... ..                    | 58      |
| 2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun yang lalu ..... | 60      |

|  |            |
|--|------------|
| 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023<br>Jangka. menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan<br>strategis organisasi ..... | 64         |
| 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar<br>Nasional .....  | 66         |
| 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan ...   | 69         |
| 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....  | 77         |
| 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau<br>Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....                                       | 79         |
| B. Realisasi Anggaran.....   | 118        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>   | <b>122</b> |



## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut JenisKelamin Per 31 Desember 2023 .....                           | 19 |
| Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2023.....                      | 21 |
| Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan Per 31 Desember 2023 .....                               | 22 |
| Tabel 1.4. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2023 .....                                 | 23 |
| Tabel 1.5. Asset Tanah dan Gedung .....   | 31 |
| Tabel 1.6. Kendaraan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023.....   | 36 |
| Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJPD Provinsi Gorontalo 2017-2024 .....   | 36 |
| Tabel 2.2. Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.....  | 38 |
| Tabel 2.3. Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 .....   | 38 |
| Tabel 2.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 .....  | 38 |
| Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 .....                        | 46 |
| Tabel 2.6. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo .....                                     | 48 |
| Tabel 3.1. Skala Penilaian Capaian Kinerja .....  | 57 |
| Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 .....   | 58 |
| Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tujuan Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 .....   | 59 |
| Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Lalu .....                         | 60 |
| Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Lalu..... | 61 |

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPD .....                            | 64  |
| Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra..... | 65  |
| Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Standar Nasional.....   | 67  |
| Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Standar Nasional .....                           | 68  |
| Tabel 3.10. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....  | 77  |
| Tabel 3.11. Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatanannya <i>per 31 Desember 2023</i> .....   | 86  |
| Tabel 3.12. Rekap Realisasi Export Berdasarkan Komoditi Selang Bulan Desember Tahun 2023 .....  | 108 |
| Tabel 3.13. Rekap Total Data Pengawasan Perlindungan Konsumen di Provinsi Gorontalo Tahun 2023 .....  | 117 |
| Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2023 .....   | 120 |
| Tabel 3.15. Analisis Efisiensi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023.....   | 120 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Gambar 1.1. | Struktur Dinas Kumperindag .....  | 7  |
| Gambar 1.2. | Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin .....     | 20 |
| Gambar 1.3. | Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan..... | 21 |
| Gambar 1.4. | Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan .....          | 23 |
| Gambar 1.5. | Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon .....            | 24 |
| Gambar 2.1. | Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo .....                             | 52 |
| Gambar 2.2. | Aplikasi SIPAP .....  | 53 |
| Gambar 2.3. | Aplikasi SIKP.....  | 54 |
| Gambar 2.4. | Aplikasi Online Data System.....  | 54 |
| Gambar 2.5. | Aplikasi SIInas .....   | 56 |
| Gambar 2.6. | Elektronik Surat Keterangan Asal (E-SKA).....   | 56 |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seraya memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rakhmat dan Hidayah-Nya, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 secara umum berpedoman pada aspek-aspek pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang wajib dibuat oleh setiap OPD yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan menteri untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; yang antara lain mewajibkan seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara untuk membuat penetapan kinerja disamping itu juga dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem pelaporan ini mendorong

perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen pemerintahan, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran, dan pelaporannya.

LAKIP Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Dokumen ini mengungkapkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Dinas yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Tujuan penyusunan antara lain untuk, mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan terpercaya. Disisi lain Laporan ini dimaksudkan pula sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelola sumberdaya yang telah ditetapkan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo memiliki peran yang sangat strategis, karena memberikan informasi penting antara lain:

1. Menjelaskan hasil evaluasi kinerja Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo selama setahun
2. Menjadi tolak ukur untuk penyusunan rencana kerja di tahun selanjutnya.
3. Sebagai bahan pelaporan bagi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
4. Sebagai dasar pengambilan keputusan Rencana Strategi di tahun selanjutnya.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan LAKIP Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini, antara lain

1. Undang-Undang nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (lembaran Negara nomor 4060);

2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tertulis: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara RI nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
7. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
8. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara RI nomor 4437);
9. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
6. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

### C. Tujuan

Tuntutan dan layanan masyarakat di daerah semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai –nilai akuntabilitas menuju Good Government yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sangat diperlukan. LAKIP Diskumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kumperindag dalam melakukan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang
2. LAKIP sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan , yaitu Gubernur Gorontalo sebagai Kepala Daerah Provinsi Gorontalo

### D. Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, tugas fungsi serta struktur organisasi Diskumperindag adalah sebagai berikut :

#### 1. Tugas

Berdasarkan Bab II Pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo No. 67 Tahun 2016 Tentang Tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tugas tersebut di atas menjadi tanggung jawab seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, guna menyelesaikan dan menindaklanjuti pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai bidang kewenangan yang dimiliki, yang dilandasi dengan 5 (lima) Nilai Budaya Kerja, yakni :

- Inovasi (*Innovation*)
- Kerjasama Tim (*Team Work*)
- Membangun Kepercayaan Masyarakat (*Trust Worthiness*)
- Membangun Kesejahteraan Masyarakat (*Prosperity*) dan
- Cepat (*Speed*).

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

### 3. Struktur Organisasi, SDM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Struktur organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, ditetapkan dengan formatur sebagai berikut:





Dinas koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan 3 Orang Kepala Bidang serta 1 (satu) Kepala Balai.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

#### ❖ Fungsi OPD

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan:
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan,
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan,
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo,
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat:
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan:

- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil,
- e. Bidang Perindustrian,
- f. Bidang Perdagangan, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

▣ **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas :**

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Bidang Perdagangan yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur..

Dalam melaksanakan Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan sasaran dan kebijakan pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada sasaran dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan,
- b. penetapan Program dan Kegiatan Dinas:
- c. pembinaan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas,
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang kebijakan bidang Koperasi, MKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah.

▣ **Tugas pokok dan fungsi Sekretariat :**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. pengelolaan umum dan Kepegawaian;

- d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menatausahakan pengelolaan keuangan
- b. menghimpun dan mengolah data keuangan
- c. menyusun laporan keuangan SKPD:
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD,
- e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran,
- f. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan:
- g. menyiapkan dan menerbitkan SPM,
- h. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran,
- i. mengelola pembayaran gaji pegawai,
- j. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran,
- k. membuat register SPP, SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ,
- l. membuat laporan pengesahan SPI, pengesahan pengawasan definitive anggaran /kegiatan, register kontrak /Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak,
- m. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi,
- n. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian,
- o. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA,

- p. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan: dan
- q. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran

## 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan,
- c. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan:
- d. memelihara, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris,
- e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah,
- f. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi,
- g. pengembangan kapasitas SDM Aparatur:
- h. menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran,
- i. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan,
- j. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris:
- l. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya:

- n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris:
  - o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT:
  - p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM),
  - q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural,
  - r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit:
  - s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan:
  - t. melaksanakan tugas kehumasan,
  - u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas,
  - v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telaahan bidang-bidang dan kearsipan dinas, dan
  - w. melaksanakan penomoran, pengagandaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

▣ **Tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan**

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, melaksanakan penyuluhan, bimbingan teknis, pengembangan, supervisi dan pengawasan kelembagaan usaha, permodalan koperasi, pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, bidang Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam pengembangan kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi:
- b. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian,

- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan standarisasi organisasi, tatalaksana dan pemeringkatan koperasi,
  - d. pelaksanaan penyuluhan, pengembangan organisasi, dan tatalaksana koperasi:
  - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha dan permodalan koperasi,
  - f. melakukan pemeriksaan kelembagaan koperasi:
  - g. melakukan pengawasan pemeriksaan KSP dan USP:
  - h. penerapan sanksi, dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya
- Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

▣ **Tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan**

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan UKM, melaksanakan pembinaan, pengembangan kelembagaan data dan pemberdayaan, promosi dan pemasaran produk usaha mikro kecil menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan teknis dan pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan manajemen, data dan informasi pembiayaan Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah:
- b. penyusunan pedoman kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, bagi Koperasi, dan UKM,
- c. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan sistem promosi, dan pemasaran UKM,
- d. mengawasi pelaksanaan pembinaan pengembangan kelembagaan pemberdayaan UKM/ promosi dan pemasaran produk UKM,
- e. melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan data UKM secara periodik: dan
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan UKM.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

☐ **Tugas pokok dan fungsi Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha baru, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. Dalam melaksanakan tugas, bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan industri,
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, serta promosi industri,
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan serta promosi industri,
- d. penyiapan bahan dan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan teknis dibidang industri:
- e. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha dan sarana dibidang industri:
- f. merencanakan koordinasi dan pembinaan tehnis pengembangan komoditi industri, dan
- g. pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang industri.

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana..

## ▣ Tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada urusan perdagangan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan konsumen, promosi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan,
- b. perumusan pembinaan, pengawasan, standarisasi dan perlindungan konsumen, pendistribusi barang dan jasa lintas kab/kota,
- c. melakukan kerjasama dagang dalam Tangka peningkatan produksi dalam negeri,
- d. pelaksanaan kegiatan misi dagang nasional dan mternasional,
- e. pelaksanaan kegiatan operasi pasar dan pasar murah di kabupaten/kota:
- f. pelaksanaan bimtek bagi SDM perdagangan, dan
- g. perumusan laporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perdagangan.

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

## E. Isu-Isu Strategis Organisasi

Isu-isu strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo periode 2023-2026 sebagai berikut:

### 1. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Isu strategis di bidang Koperasi dan UMKM adalah:

- a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi
- b. Peningkatan Akses Pasar, Akses Permodalan,
- c. Peningkatan Kualitas SDM KUKM
- d. Peningkatan daya saing UKM.

Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas

yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi.
- b. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
- c. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.

Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM Isu strategis di bidang Koperasi dan UMKM adalah:

- a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi
- b. Peningkatan Akses Pasar, Akses Permodalan,
- c. Peningkatan Kualitas SDM KUKM
- d. Peningkatan daya saing UKM.

Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi.
- b. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
- c. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.
- d. Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM
- e. Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM

Tantangan dalam pengembangan Koperasi UKM adalah

- a. Sumber daya manusia (SDM), terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional

- b. Kelembagaan, dari sisi kelembagaan koperasi khususnya pembentukan koperasi dan pembuatan akta, anggota maupun pengurus koperasi tidak menemui banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- c. Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
- d. Produksi dan pemasaran, pada umumnya system produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok, dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan system manajemen pembagian tugas yang baik. Namun secara umum, kualitas pendidikan pengelola UMKM masih rendah menjadikan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan.

UMKM di Indonesia memiliki karakteristik informal yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya system pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Mayoritas UMKM belum menggunakan komputer dan belum memanfaatkan internet serta belum menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain masih sedikit UKM yang naik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini.

## **2. Bidang Perindustrian**

Isu strategis di bidang perindustrian adalah:

- a. Peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan,

- b. Peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional,
- c. Pengembangan sentra dan kluster industri di daerah,
- d. Penetapan Rencana Kawasan Industri Terpadu

### 3. Bidang Perdagangan

Isu strategis di bidang perdagangan adalah:

- a. Pelaksanaan operasi pasar
- b. Peningkatan infrastruktur
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen,
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pengawas Perdagangan,
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku usaha ekspor
- f. Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Standar
- g. Belum baiknya system distribusi barang dan jasa
- h. Masih rendahnya akses pasar luar negeri.

Hal ini ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. Rendahnya akses pasar luar negeri merupakan dampak dari belum berkembangnya sistem informasi pasar termasuk rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk *market intelegent*), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.

- i. Belum membaiknya system distribusi barang ini merupakan dampak dari jaringan distribusi yang belum tertata dengan baik (sarana pasar dan infrastruktur transportasi),
- j. Belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen,
- k. Terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi.
- l. Kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik antar provinsi maupun antar kawasan strategis di Sulawesi.
- m. Masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

#### 4. Bidang Pelayanan OPD

Isu strategis di bidang pelayanan SKPD adalah:

- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik SKPD yang ditandai dengan keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi,
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi dan monev program baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kelembagaan SKPD

#### F. KEADAAN PEGAWAI

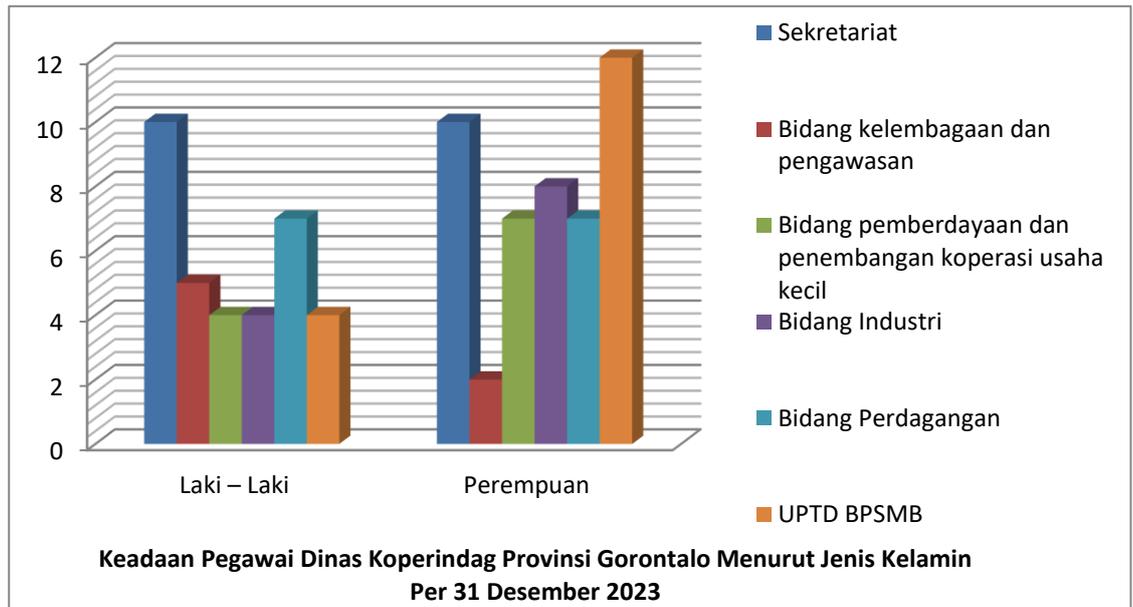
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai. Secara umum Sumber daya manusia/aparatur pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

##### a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2023

| No.           | Unit Organisasi  | Laki – Laki | Perempuan | Jumlah    |
|---------------|--|-------------|-----------|-----------|
| 1             | Sekretariat  | 10          | 10        | 20        |
| 2             | Bidang kelembagaan dan pengawasan                        | 5           | 2         | 7         |
| 3             | Bidang pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil | 4           | 7         | 11        |
| 4             | Bidang Industri  | 4           | 8         | 12        |
| 5             | Bidang Perdagangan                                       | 7           | 7         | 14        |
| 6             | UPTD BPSMB   | 4           | 12        | 16        |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>34</b>   | <b>46</b> | <b>80</b> |

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2023



Gambar 1.2. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kuperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin

Data diatas menunjukkan proporsi pegawai di lingkup Dinas Kuperindag Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh pegawai perempuan dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Dimana Jumlah pegawai perempuan mencapai 57,57% sedangkan pegawai laki-laki 42,5 %. Konsentrasi pegawai terbanyak di bagian Sekretariat sebanyak 20 orang, kemudian diikuti oleh UPTD BPSMB dan Bidang perdagangan masing-masing 14 Orang.

Berdasarkan proporsi tersebut diatas, maka penyebaran dan jumlah pegawai di Dinas Kuperindag Provinsi Gorontalo telah memenuhi unsur kesetaraan gender dalam MDG's.

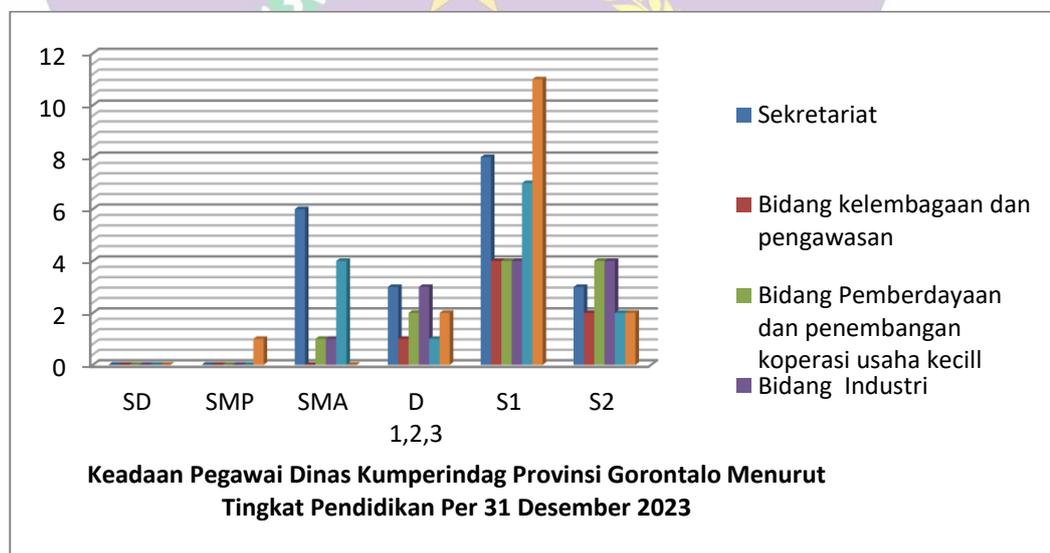
Adapun keadaan Pegawai Dinas Kuperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Dinas Kuperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2023

| No | Unit Organisasi                     | SD | SMP | SMA | D<br>1,2,3 | S1 | S2 | Jumlah |
|----|-------------------------------------|----|-----|-----|------------|----|----|--------|
| 1  | Sekretariat                         | -  | -   | 6   | 3          | 8  | 3  | 20     |
| 2  | Bidang kelembagaan dan pengawasan   | -  | -   | -   | 1          | 4  | 2  | 7      |
| 3  | Bidang Pemberdayaan dan penembangan | -  | -   | 1   | 2          | 4  | 4  | 11     |

| No            | Unit Organisasi      | SD | SMP      | SMA       | D<br>1,2,3 | S1        | S2        | Jumlah    |
|---------------|----------------------|----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|               | koperasi usaha kecil |    |          |           |            |           |           |           |
| 4             | Bidang Industri      | -  | -        | 1         | 3          | 4         | 4         | 12        |
| 5             | Bid. Perdagangan     | -  | -        | 4         | 1          | 7         | 2         | 14        |
| 6             | UPTD BPSMB           | -  | 1        | -         | 2          | 11        | 2         | 16        |
| <b>JUMLAH</b> |                      | -  | <b>1</b> | <b>12</b> | <b>12</b>  | <b>38</b> | <b>17</b> | <b>80</b> |

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2023



Gambar 1.3. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah jenjang S1 dan tidak ada pegawai yang berpendidikan SD. Adapun keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menunjukkan 47,5% berpendidikan S1. Kemudian untuk ASN yang memiliki jenjang pendidikan S2 sebesar 21,25%,. Begitupun halnya dengan ASN yang memiliki pendidikan D1,D2,D3 tahun 2023 sebesar 15%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 sebesar 14,28%. Untuk jenjang pendidikan SMA ditahun 2023 sebesar 15% mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 15,48% dan jenjang SMP sebesar 2 %.

Berdasarkan data tersebut diatas maka pengembangan SDM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo masih diperlukan dalam rangka penyiapan SDM yang handal dan professional, serta mendorong pegawai yang berpendidikan setara SMA dan Diploma untuk mengikuti pendidikan S1 sesuai keahlian. Meskipun telah terlihat adanya peningkatan dari pendidikan jenjang SMA ke S1.

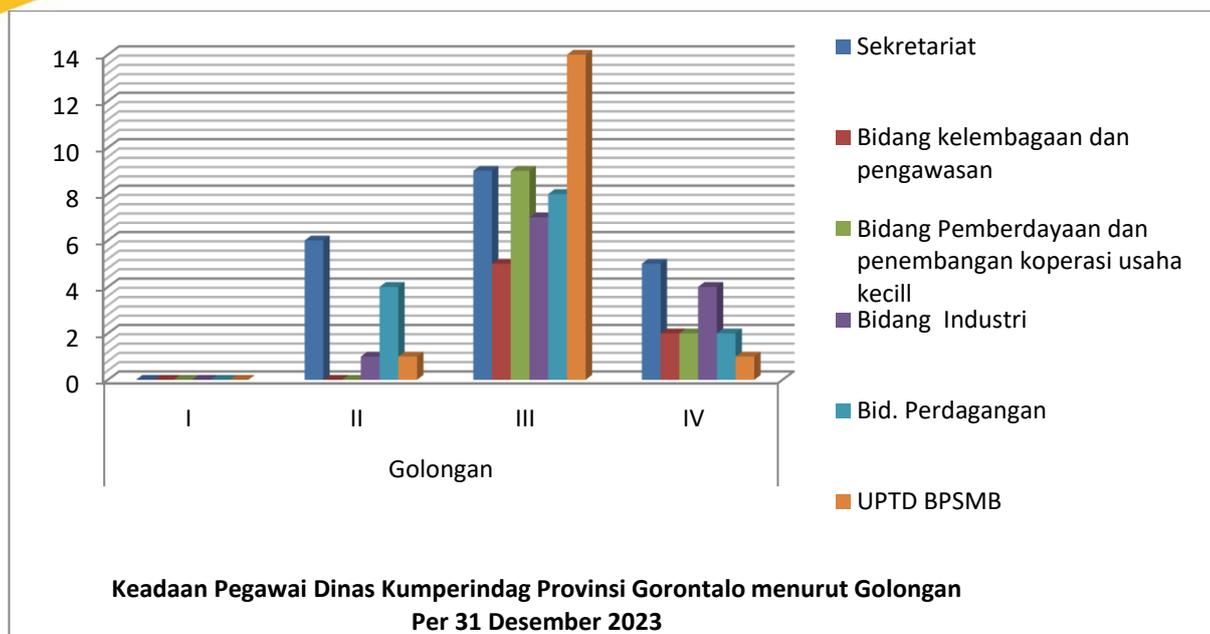
Upaya meningkatkan jumlah PNS dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus diikuti pula dengan upaya yang sistimatis terhadap kesesuaian disiplin ilmu dengan tupoksi OPD. Dengan begitu, pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat ditingkatkan.

Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menurut Golongan Per 31 Desember 2023

| No           | Unit Organisasi  | Golongan |           |           |           | Jumlah    |
|--------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |  | I        | II        | III       | IV        |           |
| 1            | Sekretariat  | 0        | 6         | 9         | 5         | 20        |
| 2            | Bidang kelembagaan dan pengawasan                        | 0        | 0         | 5         | 2         | 7         |
| 3            | Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil | 0        | 0         | 9         | 2         | 11        |
| 4            | Bidang Industri  | 0        | 1         | 7         | 4         | 12        |
| 5            | Bid. Perdagangan   | 0        | 4         | 8         | 2         | 14        |
| 6            | UPTD BPSMB   | 0        | 1         | 14        | 1         | 16        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>0</b> | <b>12</b> | <b>52</b> | <b>16</b> | <b>80</b> |

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2023

Berdasarkan tabel diatas maka keadaan pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan terdiri dari 15% golongan II, 65% golongan III dan 20 % golongan IV.

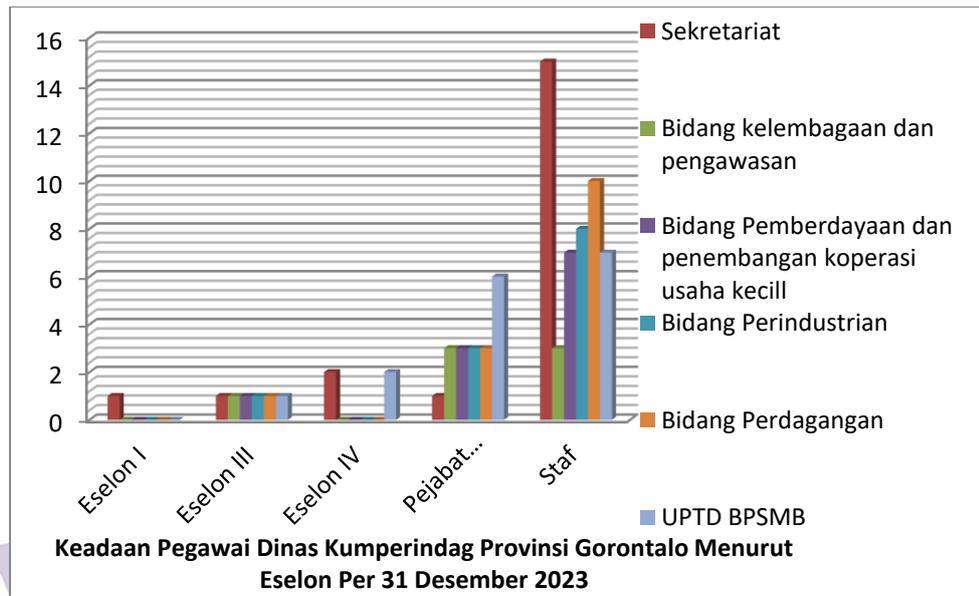


Gambar 1.4. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan

Tabel 1.4. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2023

| No           | Unit Organisasi  | Eselon   |          |          | Pejabat Fungsional | Staf      | Jumlah    |
|--------------|--|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
|              |  | II       | III      | IV       |                    |           |           |
| 1            | Sekretariat  | 1        | 1        | 2        | 1                  | 15        | 20        |
| 2            | Bidang kelembagaan dan pengawasan                        | -        | 1        | 0        | 3                  | 3         | 7         |
| 3            | Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil | -        | 1        | 0        | 3                  | 7         | 11        |
| 4            | Bidang Perindustrian                                     | -        | 1        | 0        | 3                  | 8         | 12        |
| 5            | Bidang Perdagangan                                       | -        | 1        | 0        | 3                  | 10        | 14        |
| 6            | UPTD BPSMB   | -        | 1        | 2        | 6                  | 7         | 16        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>1</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>19</b>          | <b>50</b> | <b>80</b> |

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2023



Gambar 1.5. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon

Keadaan pegawai menurut eselon menunjukkan jumlah pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo urusan wajib dengan komposisi pejabat eselon II sebanyak 1 orang (1,25%), pejabat eselon III berjumlah 6 orang atau 7,50 % dan pejabat eselon IV berjumlah 4 orang atau 5 %. Dari komposisi ini terlihat bahwa tenaga atau pejabat fungsional di lingkup Dinas Kumperindag pada urusan Koperasi & UKM tersedia sebanyak 19 orang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penambahan jumlah pejabat fungsional di tahun 2023 karena adanya penyetaraan jabatan dari struktur Eselon IV ke pejabat fungsional.

## G. SARANA PRASARANA KANTOR

Dalam mewujudkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan bidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo didukung oleh sarana dan prasarana antara lain :

### 1. Tanah dan Bangunan

Tanah dan bangunan gedung merupakan fasilitas vital yang dimiliki oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Hingga 31 Desember 2023 tanah dan gedung yang tercatat sebagai asset Dinas Kumperindag dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5. Asset Tanah dan Gedung

| No | Jenis Barang / Nama Barang       | Luas (M2)  | Tahun Pengadaan | Letak/ Alamat                                 | Penggunaan                           | Keterangan  |
|----|----------------------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------------|---|
| 1  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 15,424 .00 | 2004            | Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila      | Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo | Belanja Pengadaan Tanah Tahap I Sertifikat Asli ada di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Prov. Gorontalo       |
| 2  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 0          | 2004            | Jln Tengah Desa Toto Selatan                  |                                      | Belanja Pengadaan Tanah Tahap II  |
| 3  | Tanah Bangunan Laboratorium      | 8,769. 00  | 2004            | Jln Tinaloga Desa Toto Utara Kec. Kabila      | UPTD. Balai Metrologi                | Sertifikat Asli ada di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Prov. Gorontalo                                       |
| 4  | Tanah Lapangan lainnya           | 23,100 .00 | 2013            | Kel. Buliide                                  |                                      | Diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Sertifikat di Dinas Keuangan dan Aset Provinsi Gorontalo |
| 5  | Tanah Lapangan Taman lainnya     | 243        | 2007            | taman wisata iluta                            |                                      | Bukan Taman Wisata Iluta, tetapi Taman Wisata di Area KIAM senilai Rp. 20.000.000,                          |
| 6  | Bangunan Gedung Kantor Permanen  | 383,6 6    | 12/31/2 006     | Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango |                                      | Gedung Kantor UPTD. Metrologi Tahun 2006  |

| No | Jenis Barang / Nama Barang       | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak/ Alamat                                  | Penggunaan | Keterangan   |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------|--|------------|--|
| 7  | Bangunan Gedung Kantor Permanen  | 15242     | 12/31/2005      | Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab.Bone Bolango  |            | Gedung Pusat Promosi (Gedung Kantor Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo) Tahun 2005   |
| 8. | Bangunan Gedung Kantor Permanen  | 8769      | 12/31/2006      | Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango  |            | Gedung UPTD. BPSMB (diperoleh awal Rp. 401.466.000,- tambahan rehab 2012 dikapitalisasi sebesar Rp. 218.997.500,-) Tahun 2006 Penyimpanan UPTD. Metrologi Tahun 2006 |
| 9  | Bangunan Gedung Kantor Permanen  | 43,37     |                 |  |            | pekerjaan pembangunan gedung pelayanan tera-tera ulang uptd. metrologi   |
| 10 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 565,8     |                 | Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango |            | Pengadaan Backdrop   |
| 11 | Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain | 386       |                 | Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango |            | Pengadaan Panggung   |
| 12 | Bangunan Gedung kantor Lain-Lain | 129600    |                 | Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango  |            | Belanja Rumah Genset BPSMB   |

| <b>No</b> | <b>Jenis Barang / Nama Barang</b>     | <b>Luas (M2)</b> | <b>Tahun Pengadaan</b>                        | <b>Letak/ Alamat</b>                                       | <b>Penggunaan</b> | <b>Keterangan</b>   |
|-----------|---------------------------------------|------------------|---|--|-------------------|---|
| 13        | Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain      | 4                |   | Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango |                   | Gazebo  |
| 14        | Bangunan Gudang Tertutup Permanen     | 70,5             |   | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango                    |                   | Gedung Hasil Produksi (untuk Kegiatan Fasilitas Pengembangan Teknologi Inkubator Teknologi dan Bisnis) Tahun 2008 |
| 15        | Bangunan Gudang Tertutup Permanen     | 63               |   | Jl. Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango             |                   | Gudang Arsip dan Inventaris Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2013                                       |
| 16        | Bangunan Gudang Lain-Lain (dst)       | 148              |   | Jln Tinaloga Desa Toto Utara Kec. Kabila                   |                   | Gedung Penyimpanan UPTD. Metrologi Tahun 2006   |
| 17        | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 8769             |   | Jl. Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango             |                   | Gedung Laboratorium UPTD. Metrologi Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo  |
| 18        | Gedung Pos Jaga Permanen              | 92,4             |   | Jl. Sawah Besar Kec. Kabila                                |                   | Pos satpam  |
| 19        | Gedung Garasi/Pool Permanen           | 34,1             | Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango |  |                   | Garasi Kendaraan Dinas  |

| No | Jenis Barang / Nama Barang      | Luas (M2) | Tahun Pengadaan  | Letak/ Alamat                           | Penggunaan | Keterangan  |
|----|---------------------------------|-----------|--|---|------------|---|
| 20 | Bangunan Kolam bak Ikan         | 230,4     | Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango |   |            | Fasilitas Umum  |
| 21 | Bangunan Penerangan taman       | 1421      | Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango |   |            | Penataan Lampu Hias Kolam   |
| 22 | Bangunan Fasilitas Umum Lainnya | 53,48     | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango                    |   |            | Tempat Genset, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007                |
| 23 | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 75,85     | Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango             |   |            | Gedung Stand Pameran, Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2008         |
| 24 | Bangunan Fasilitas Umum lainnya | 354       |  |   |            | Taman (Panggung dan Paving)   |
| 25 | Bangunan Gedung Pabrik Permanen | 66,5      | 12/31/2006   | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango |            | Gedung Pengolahan Bakso Ikan, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006 |

| <b>No</b> | <b>Jenis Barang / Nama Barang</b> | <b>Luas (M2)</b> | <b>Tahun Pengadaan</b> | <b>Letak/ Alamat</b>                    | <b>Penggunaan</b> | <b>Keterangan</b>   |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|---|-------------------|---|
| 26        | Bangunan Gedung Pabrik Permanen   | 108              |                        | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango |                   | Gedung Pengolahan Jagung, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006       |
| 27        | Bangunan Gedung Pabrik Permanen   | 93.5             |                        | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango |                   | Gedung Pengolahan Pakan Ternak, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006 |
| 28        | Bangunan Gedung Pabrik Permanen   | 66.5             |                        | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango |                   | Gedung Pengolahan Cabe Bubuk, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006   |
| 29        | Bangunan Gedung Pabrik Permanen   | 87,5             |                        | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango |                   | Gedung Pengolahan Jahe, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006         |
| 30        | Bangunan Gedung Pabrik Permanen   | 87,5             |                        | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango |                   | Gedung Pengolahan Saos Tomat, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007   |
| 31        | Bangunan Gedung Pabrik Permanen   | 89               |                        | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango |                   | Bangunan Pabrik VCO, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007            |

| <b>No</b> | <b>Jenis Barang / Nama Barang</b> | <b>Luas (M2)</b> | <b>Tahun Pengadaan</b> | <b>Letak/ Alamat</b>                             | <b>Penggunaan</b> | <b>Keterangan</b>  |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|--|-------------------|--|
| 32        | Bangunan Gedung Pabrik permanen   | 43,37            |                        | Ds. Dulomo Kc. Tilango Kab Gorontalo             |                   | Gedung Pabrik Es di Provinsi Gorontalo pada Kegiatan Pengembangan Industri Terpadu |
| 33        | Taman Semi Permanan               | 796              |                        | Jl. toto selatan Kab. Bone Bolango               |                   | Paving Kolam   |
| 34        | Taman Semi Permanan               | 980              |                        | Jl. toto selatan Kab. Bone Bolango               |                   | Penataan Kolam   |
| 35        | Taman lainnya                     | 8769             |                        | Jl. Tinaloga Desa Toto Selatan Kab. Bone-Bolango |                   | Bangunan Pagar UPTD. Metrologi dan UPTD. BPSMB Tahun 2005                          |
| 36        | Taman lainnya                     | 1.65             |                        | Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango          |                   | Pembangunan Pagar Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007                  |
| 37        | Taman lainnya                     | 14,4             |                        | Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango   |                   | Pondasi Pagar Kantor Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2008               |
| 38        | Taman lainnya                     | 14,4             |                        | Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango   |                   | Pagar Kantor Keliling  |
| 39        | Pagar permanen                    | 14,4             |                        | Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango   |                   | Pagar Depan Kantor   |
| 40        | Pagar Permanen                    | 14,4             |                        | ~ Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango |                   | Lanjutan bangunan pagar kantor   |

| No | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak/ Alamat                           | Penggunaan | Keterangan             |
|----|----------------------------|-----------|-----------------|---|------------|------------------------|
| 41 | Pagar Semi Permanen        | 54        |                 | Ds. Bube. Kec. Suwawa. Kab Bone Bolango |            | Pembangunan Pagar KIAM |

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2023

## 2. Kendaraan Dinas

Salah satu aspek pendukung operasional tugas pokok dan fungsi Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo adalah kendaraan dinas roda dua maupun roda empat. Adapun jumlah kendaraan dinas per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6. Kendaraan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023

| Uraian                               | Jumlah         |
|--------------------------------------|----------------|
| Kendaraan Roda Dua / Motor           | 24 unit        |
| Kendaraan Dinas Plat Merah / Non KDO | 8 unit         |
| <b>Total</b>                         | <b>32 unit</b> |

## H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Adapun sistematika penyusunan LAKIP Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan
- D. Gambaran Umum OPD
- E. Isu-Isu Strategis Organisasi
- F. Keadaan Pegawai
- G. Sarana & Prasarana Kantor
- H. Sistematika Penyusunan

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

C. Rencana Anggaran Tahun 2023

D. Instrumen Pendukung

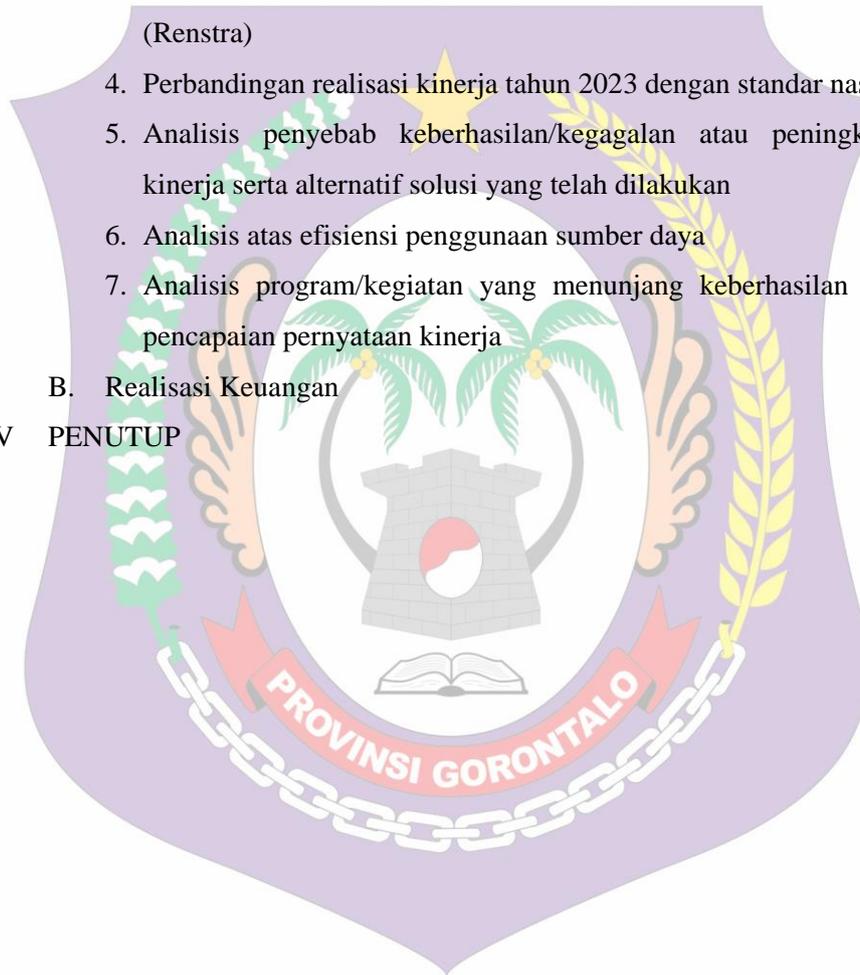
### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Diskumperindag Provinsi Gorontalo

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023
2. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun yang lalu
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra)
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Keuangan

### BAB IV PENUTUP



### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo selama kurun waktu satu sampai dengan empat tahun yaitu tahun 2023-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah Menengah Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023- 2026 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk bagi Penjabat Gubernur untuk menyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo sampai dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik. Dokumen RPD juga sebagai pedoman DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dokumen RPD disusun secara sinergis, terpadu, menyeluruh dan partisipatif, serta searah dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, dan selaras dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan dengan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karenanya, dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka seluruh unsur perangkat daerah, masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan serta mendukung program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Selanjutnya sebagai pedoman, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstra) tahun 2023- 2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dalam penyusunannya, perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD dan Renstra Perangkat Daerah.

## 1. Visi dan Misi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah Menengah Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023- 2026 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPD disusun secara sinergis, terpadu, menyeluruh dan partisipatif, serta searah dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, dan selaras dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan dengan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Maka sebagai pedoman, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstra) tahun 2023- 2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 ini tidak terlepas dari penjabaran dari dokumen Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan empat tahun pada sektor Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Gorontalo dan dokumen tersebut merupakan penjabaran teknis dari dokumen RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dirumuskan berdasarkan Kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, dimana penyusunannya dilakukan secara teknokratik. RPD 2023 - 2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode akhir dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan *Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu Gorontalo Maju Dan Mandiri.*

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RPD 2023-2026 mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dimana terdapat misi yang menjadi penjabaran pencapaian visi RPJPD serta focus-fokus pembangunan utama, yaitu; Misi Pertama, Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, Misi Kedua, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal. Misi ketiga, Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah

**Tujuan :**

1. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan indikator tujuan sebagai berikut :

~ Rasio Konektivitas Provinsi

2. Meningkatnya kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, pelayanan publik yang lebih berkualitas serta akuntabilitas kinerja dan perencanaan, pengawasan, yang handal, efektif dan berintegritas :

- Nilai SAKIP (dari B menjadi A)

- Nilai WTP

- Indeks Kepuasan Masyarakat

- Indeks Inovasi Daerah

~ Presentase Hasil Temuan (Nol Temuan)

Dokumen RPD disusun secara sinergis, terpadu, menyeluruh dan partisipatif, serta searah dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, dan selaras dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Selanjutnya Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstra) tahun 2023- 2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam penyusunannya, perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD dan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dirumuskan berdasarkan Kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, dimana penyusunannya dilakukan secara teknokratik. RPD 2023 - 2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan

yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode akhir dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu Gorontalo Maju Dan Mandiri. Misi Pertama, Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, Misi Kedua Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal dan misi ketiga Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur cascade RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

| <b>VISI : "Gorontalo Maju dan Mandiri"</b>         |  |                         |  |                          |
|--|--|-------------------------|--|--------------------------|
| <b>MISI</b>  | <b>TUJUAN</b>                                    | <b>INDIKATOR TUJUAN</b> | <b>SASARAN</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b> |
| Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal | Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat | Pertumbuhan Ekonomi     | Meningkatnya Nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian | Nilai Export (Juta USD)  |
|  |  | Inflasi                 |  |                          |
|  | Terwujudnya Good dan Clean Government            |                         | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan   | Nilai SAKIP              |

*\*Visi & Misi mengacu pada RPJPD 2007-2025*

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian visi dan misi maka yang menjadi tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo di Bidang Kumperindag tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

| <b>Tujuan</b>                                    | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Base Line 2022</b> | <b>Target Tahunan</b> |             |             |             | <b>Target Akhir RPD</b> |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|  |                         |                       | <b>2023</b>           | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |                         |
| Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat | Pertumbuhan Ekonomi     | 4,01                  | 5,67                  | 6,42        | 6,66        | 7,1         | 7,1                     |
|  | Inflasi                 | 2,63                  | 4-5                   | 1,93        | 1,86        | 1,82        | 1,82                    |

Berangkat dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berupaya

mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu: “Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB dan Nilai Export (juta USD)”.

## 2. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran strategis merupakan bagian integral dari perencanaan strategis sekaligus menjadi dasar yang kuat dalam mengendalikan, memantau dan mengukur pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, dengan asumsi bahwa jika seluruh sasaran strategis telah dicapai maka dengan sendirinya tujuan strategis pun akan tercapai. Indikator tujuan dapat diukur melalui indikator sasaran.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Perumusan tujuan didasarkan pada isu-isu aktual dan analisa sehingga Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat secara tepat menentukan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan. Dengan mengacu pada visi dan misi RPJPD dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Melalui perumusan tujuan strategis, Dinas Kumperindag dapat mengukur sejauh mana visi dan misi dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Dengan mengacu pada visi dan misi RPJPD tersebut diatas, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk 4 (empat) tahun sebagaimana jangka waktu Renstra.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, maka Tujuan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah :

- 1). Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
- 2). Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian

dengan indikator tujuan sebagai berikut :

- 1). Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan
- 2). Kontribusi Industri terhadap PDRB

### 3) Nilai Ekspor

## 3. Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan strategis yang telah ditetapkan maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu empat tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

| No | Sasaran strategis                                       | Indikator Kinerja                              | Target Tahunan |              |              |              | Kondisi Akhir RPD Renstra |
|----|---|--|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
|    |   |  | 2023           | 2024         | 2025         | 2026         |                           |
| 1  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kumperindag | Nilai SAKIP                                    | 74,5           | 74,68        | 74,88        | 75,05        | 75,05                     |
| 2  | Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah    | Jumlah Koperasi Berkualitas                    | 20             | 20           | 20           | 20           | 20                        |
|    |   | Jumlah UKM yang berdaya saing                  | 60             | 70           | 80           | 90           | 300                       |
|    | Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah        | Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah | 0,78%          | 0,84%        | 0,90%        | 0,95%        | 0,95%                     |
|    | Meningkatnya Nilai Export                               | Jumlah Nilai Ekspor                            | \$14.102.573   | \$14.807.701 | \$15.548.086 | \$16.325.490 | \$16.325.490              |

## 4. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

| Sasaran   | Indikator Sasaran | Strategi                                     | Kebijakan   |
|---|-------------------|--|---|
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kumperindag | Nilai SAKIP       | Meningkatkan Kualitas Perencanaan,           | 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan        |
|   |                   | Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi | 2. Transformasi digital dalam penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |

| Sasaran  | Indikator Sasaran                              | Strategi  | Kebijakan   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | 3. Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran   |
|  |  |   | 4. Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral dan Keuangan  |
| Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), | Jumlah Koperasi Berkualitas                    | Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi UKM   | 1. Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi   |
|  |  |   | 2. Peningkatan Kapasitas Usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha                        |
|  |  |   | 3. Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi    |
|  | Jumlah UKM yang berdaya saing                  |   | 4. Fasilitasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM |
|  |  |   | 5. Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM (Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia)   |
|  |  |   | 6. Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan)                      |
| Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), | Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah | Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri | 1. Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041                                |
|  |  |   | 2. Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri  |
|  |  |   | 3. Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital  |
| Meningkatnya nilai ekspor (USD)                                | Jumlah Nilai Ekspor                            | Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar   | 1. Pengawasan dan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting                            |
|  |  |   | 2. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan/ tertib niaga/ barang beredar dan jasa serta rekomendasi ekspor    |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi  | Kebijakan   |
|---------|-------------------|---|---|
|         |                   |   | 3. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/barang beredar dan jasa serta promosi penggunaan produk dalam negeri |
|         |                   | Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor | 4. Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor dan Optimalisasi Task Force Ekspor  |
|         |                   | Pengembangan usaha dan mutu pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan        | 5. Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang  |

Dalam Pencapaian misi Pemerintah Daerah pada RPJPD ini, maka Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan menjabarkannya menjadi tujuan perangkat daerah yaitu

- 1). Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
- 2). Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian

Indikator Tujuan yaitu :

- 1). Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan
- 2). Kontribusi Industri terhadap PDRB
- 3). Nilai Ekspor

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, maka dijabarkan kembali menjadi sasaran yaitu

- 1). Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kumperindag
- 2). Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)
- 3). Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase),
- 4). Meningkatnya nilai ekspor (USD)

dengan indikator sasaran yaitu :

- 1). Nilai SAKIP
- 2). Jumlah Koperasi Berkualitas
- 3). Jumlah UKM yang berdaya saing
- 4). Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah
- 5). Jumlah Nilai Ekspor

Pencapaian kinerja pada **indikator tujuan pertama**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan.

- ✚ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ✚ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- ✚ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- ✚ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- ✚ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pencapaian kinerja pada **indikator tujuan kedua**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- 1). Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Outcome dari program ini Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya

Kegiatan adalah:

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

(Termasuk DAK Non Fisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM & Ketenagakerjaan)

2). Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Outcome dari program ini adalah jumlah koperasi sehat

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
Sub Kegiatan :

Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta Akuntabel

3). Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Outcome dari program ini adalah jumlah koperasi aktif

Prioritas kegiatan adalah:

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

4). Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);

Outcome program ini adalah Jumlah UKM yang berdaya saing

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan :

- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja

Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

5). Program Pengembangan UMKM

Outcome program ini adalah Jumlah UKM yang bertransformasi usaha Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

6). Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Outcome Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri

- ✚ Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

7). Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Outcome Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

8). PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Outcome Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi

- ✚ Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

9). Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Outcome Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen

- ✚ Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab/Kota
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
- ✚ Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Layanan Pengujian
  - Pengembangan Layanan Sertifikasi
  - Verifikasi Mutu Produk
- ✚ Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

10). Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Outcome Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting

- ✚ Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang

Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sub Kegiatan :

- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota
- Operasi pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

11). Program Pengembangan Ekspor

Outcome Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Sub Kegiatan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Perpres No. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun petunjuk Teknis tentang penyusunan Kinerja yakni:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur,
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Petunjuk teknis tentang penyusunan perjanjian kinerja tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja  
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Gorontalo Tahun 2023**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                        | TARGET             |
|----|---|--|--------------------|
| 1  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan Dinas Kumperindag       | Nilai SAKIP                                    | 74,5               |
| 2  | Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (jumlah) | Jumlah Koperasi Berkualitas                    | 20 Koperasi        |
|    |   | Jumlah UKM yang berdaya saing                  | 60 UKM             |
|    | Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) | Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah | 0,78%              |
|    | Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)                               | Jumlah Nilai Ekspor                            | US\$<br>14.102.573 |

### C. Rencana Anggaran Tahun 2023

Dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2023, Alokasi anggaran Dinas Kumperindag setelah perubahan sebesar **Rp. 53.980.687.812,-** anggaran ini sudah termasuk gaji, tunjangan ASN dan DAK non fisik. Pagu anggaran awal Dinas Kumperindag TA. 2023 sebesar Rp. 29.716.135.532,- kemudian terdapat revisi anggaran pada beberapa sub kegiatan sebesar Rp. 277.650.780,- pergeseran antar OPD melalui BTT sebesar Rp. 1.933.565.000,- DID Kinerja Sisa IF TA. 2022 Rp. 633.025.000,- (sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dan sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kemudian tambahan anggaran melalui DID Kinerja Tahun Berjalan Inflasi 1 Rp. 3.963.421.000,- (sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, tambahan IF Tahun Berjalan Inflasi 3 Rp. 5.055.630.500,- (sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan

Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.) dan tambahan melalui APBD-P Rp. 12.401.260.000,- Total anggaran setelah perubahan sejumlah Rp. 53.980.687.812,-.

Sehingga total pagu akhir tahun 2023 Diskumperindag provinsi Gorontalo sebesar **Rp. 53.980.687.812,-**. (lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Sehingga Implementasi rencana strategis tahun 2017-2022 untuk tahun 2023 yang mencakup pelaksanaan program/kegiatan mendapat dukungan anggaran total sebesar **Rp. 53.980.687.812,-**. (melalui sumber dana APBD dan DID) yaitu :

✚ *Pagu Tahun Anggaran 2023*

- **Belanja Operasi** : **Rp. 53.980.687.812,-**
  - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.477.231.693
  - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 43.955.896.119,-
- **Belanja Modal** : **Rp. 547.560.000**

✚ *Realisasi Anggaran :*

- **Belanja Operasi** : **Rp. 50.144.137.080,-**
  - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.184.737.481
  - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 40.415.424.288,-
- **Belanja Modal** : **Rp. 543.975.311**

Anggaran ini untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang terdiri atas 13 program, 21 kegiatan dan 28 sub kegiatan (termasuk DAK Non Fisik). Ditahun 2023 terdapat indikator program yang belum tercapai. Adapun untuk indikator program yang belum tercapai antara lain :

a. Indikator Program :

- Jumlah Koperasi yang berdaya saing dengan capaian 50 UKM dari target 60 UKM. UKM ini telah mengikuti kurasi produk yang dilaksanakan oleh Dinas Kumerindag provinsi gorontalo dan bank Indonesia.

### **Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis**

Anggaran belanja langsung Dinas Kumerindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

| No            | Sasaran  | Anggaran (Rp)           |
|---------------|--|-------------------------|
| 1             | ~ Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan<br>~ Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian |                         |
| 2             | Dari Dana APBD   | 51.959.104.812,-        |
| 3             | Dari Dana DAK Non Fisik  | 2.021.583.000-          |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>53.980.687.812,-</b> |

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

| SASARAN STRATEGIS                            | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | PAGU AWAL             | PAGU SETELAH PERUBAHAN |
|--|--|-----------------------|------------------------|
|  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> | <b>29.716.135.532</b> | <b>53.980.687.812</b>  |
|  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>        | <b>23.245.680.313</b> | <b>34.049.094.241</b>  |
| <b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 | <b>13.975.723.713</b> | <b>14.040.115.641</b>  |
|  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      | <b>930.536.400</b>    | <b>930.536.400</b>     |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | 520.283.400           | 460.522.900            |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 410.253.000           | 470.013.500            |
|  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>9.641.919.913</b>  | <b>9.593.170.693</b>   |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 9.525.980.913         | 9.477.231.693          |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                  | 115.939.000           | 115.939.000            |
|  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>377.474.000</b>    | <b>377.474.000</b>     |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | 377.474.000           | 377.474.000            |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>1.540.897.000</b>  | <b>1.358.409.100</b>   |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 1.540.897.000         | 1.358.409.100          |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>1.484.896.400</b>  | <b>1.780.525.448</b>   |
|  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 1.484.896.400         | 1.780.525.448          |
|  |  |                       | -                      |
| <b>Meningkatnya kapasitas Koperasi</b>       | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                           | <b>340.000.200</b>    | <b>140.000.200</b>     |

| SASARAN STRATEGIS   | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | PAGU AWAL            | PAGU SETELAH PERUBAHAN |
|---|--|----------------------|------------------------|
| Usaha Kecil Menengah (jumlah)   | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>   | 340.000.200          | 140.000.200            |
|   | Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel   | 340.000.200          | 140.000.200            |
|   | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>  | <b>1.494.733.400</b> | <b>1.494.733.400</b>   |
|   | <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>   | <b>1.494.733.400</b> | <b>1.494.733.400</b>   |
|   | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  | 1.494.733.400        | 1.494.733.400          |
|   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>  | <b>351.394.900</b>   | <b>511.954.900</b>     |
|   | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>  | <b>351.394.900</b>   | <b>511.954.900</b>     |
|   | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha   | 351.394.900          | 511.954.900            |
|   | <b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>  | <b>1.464.807.200</b> | <b>1.858.867.200</b>   |
|   | <b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>                            | <b>1.464.807.200</b> | <b>1.858.867.200</b>   |
|   | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 530.576.200          | 905.276.200            |
|   | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan   | 934.231.000          | 953.591.000            |
|   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>   | <b>5.619.020.900</b> | <b>16.003.422.900</b>  |
|   | <b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>  | <b>5.619.020.900</b> | <b>16.003.422.900</b>  |
| Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 5.619.020.900  | 16.003.422.900       |                        |
|   |  |                      |                        |
|   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |                      | -                      |

| SASARAN STRATEGIS               | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | PAGU AWAL            | PAGU SETELAH PERUBAHAN |
|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| Meningkatnya Nilai Ekspor (USD) | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>  | <b>3.865.228.814</b> | <b>16.431.164.166</b>  |
|                                 | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>  | <b>100.851.820</b>   | <b>100.851.820</b>     |
|                                 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)  | 100.851.820          | 100.851.820            |
|                                 | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>   | <b>847.984.192</b>   | <b>13.333.703.192</b>  |
|                                 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 709.173.182          | 13.206.449.682         |
|                                 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota  | 101.696.410          | 112.256.410            |
|                                 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   | 607.476.772          | 13.094.193.272         |
|                                 | <b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</b>                                      | <b>138.811.010</b>   | <b>127.253.510</b>     |
|                                 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi  | 138.811.010          | 127.253.510            |
|                                 | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>   | <b>251.801.947</b>   | <b>234.795.299</b>     |
|                                 | <b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>                     | <b>251.801.947</b>   | <b>234.795.299</b>     |
|                                 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan  | 251.801.947          | 234.795.299            |
|                                 | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>   | <b>2.664.590.855</b> | <b>2.761.813.855</b>   |
|                                 | <b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>1.862.791.071</b> | <b>2.020.408.071</b>   |
|                                 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen  | 1.862.791.071        | 2.020.408.071          |
|                                 | <b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>697.806.740</b>   | <b>637.412.740</b>     |
|                                 | Verifikasi Mutu Produk   | 122.042.000          | 122.042.000            |
|                                 | Pengembangan Layanan Pengujian   | 433.147.740          | 391.155.740            |
|                                 | Pengembangan Layanan Sertifikasi   | 142.617.000          | 124.215.000            |
|                                 | <b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>103.993.044</b>   | <b>103.993.044</b>     |

| SASARAN STRATEGIS  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | PAGU AWAL            | PAGU SETELAH PERUBAHAN |
|--|--|----------------------|------------------------|
|  | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen   | 103.993.044          | 103.993.044            |
| <b>Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>  | <b>2.605.226.405</b> | <b>3.500.429.405</b>   |
|  | <b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  | <b>2.335.763.785</b> | <b>3.257.366.785</b>   |
|  | <b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>   | <b>2.335.763.785</b> | <b>3.257.366.785</b>   |
|  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri   | 882.863.900          | 1.309.501.900          |
|  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   | 1.186.499.300        | 1.738.164.300          |
|  | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri   | 266.400.585          | 209.700.585            |
|  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>  | <b>119.354.545</b>   | <b>92.954.545</b>      |
|  | <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>   | <b>119.354.545</b>   | <b>92.954.545</b>      |
|  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 119.354.545          | 92.954.545             |
|  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>  | <b>150.108.075</b>   | <b>150.108.075</b>     |
|  | <b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>   | <b>150.108.075</b>   | <b>150.108.075</b>     |
|  | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)  | 150.108.075          | 150.108.075            |

#### D. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag dalam menunjang pembangunan daerah dibidang koperasi UKM perindustrian dan perdagangan dengan membangun beberapa sistem informasi.

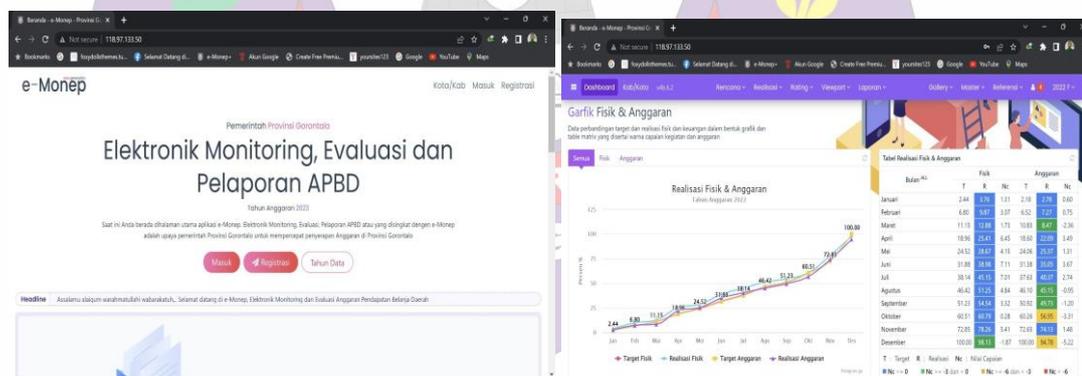
Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja

baik dalam hal meningkatkan kapasitas Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana pembangunan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi.

### 1. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi

Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan berisi Monev APBD, dengan alamat akses <https://e-monev.gorontaloprov.go.id>. Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;



Gambar 2.1. Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo

Aplikasi e-monev bagi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo digunakan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas-Mu pembangunan dibidang koperasi UKM perindustrian dan perdagangan untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan dan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan

## 2. APLIKASI SIKP

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yaitu Sistem yang digunakan untuk menampung data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa data calon debitur, akad kredit (debitur), dan transaksi pembayaran/ angsuran KUR yang bisa di akses Pemerintah Daerah dan Pihak lain yang ditentukan oleh Komite Kebijakan. Dinas/ pemerintah daerah bisa mengunggah data calon debitur Dan sebagai acuan kebijakan terkait pemberdayaan UMKM

| No    | Kode Pemda | Nama Pemda           | Jumlah Calon Debitur | Total Rencana Kredit | Jumlah Debitur | Total Nilai Akad |
|-------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 1     | 7501       | Kab. Gorontalo       | 119                  | 953.000.000          | 0              | 0                |
| 2     | 7502       | Kab. Sulaiki         | 3.062                | 10.000.015           | 694            | 17.679.345.000   |
| 3     | 7503       | Kab. Bonebolango     | 1.031                | 5.920.500.000        | 309            | 7.589.600.000    |
| 4     | 7504       | Kab. Pohuwato        | 101                  | 1.000.000            | 44             | 738.000.000      |
| 5     | 7505       | Kab. Gorontalo Utara | 43                   | 10.000.000           | 12             | 141.500.000      |
| 6     | 7571       | Kota Gorontalo       | 1.582                | 23.581.500.000       | 465            | 6.973.000.000    |
| Total |            |                      | 8.937                | 30.478.000.015       | 1.404          | 38.118.948.000   |

Gambar 2.2. Aplikasi SIKP

## 4. Online Data System (ODS)

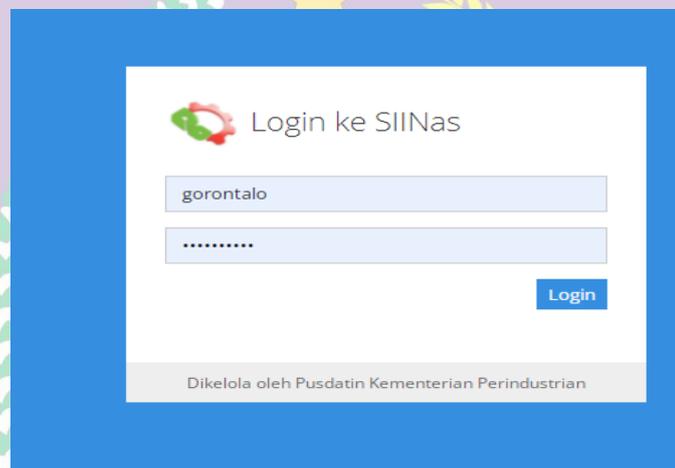
Online Data Sistem (ODS) Koperasi adalah sistem aplikasi pendataan Koperasi yang dapat diakses secara online oleh para pihak yang berkepentingan yang ada pada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi KUKM diselenggarakan oleh Bagian Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Aplikasi ODS ini telah digunakan sejak tahun 2010 untuk mendukung data agregat. Data ODS Koperasi secara individu meliputi data sebagai berikut :Nama Koperasi, b. Nomor & Tanggal Badan Hukum, Alamat tempat kedudukan, Identitas Koperasi (Jenis & Kelompok), Sektor usaha koperasi, Data Kepengurusan, data Peningkatan & Kesehatan Koperasi, Data Indikator Keuangan, Data Indikator kelembagaan.

| No | Kode Kabupaten | Koperasi (Nama) | Anggota (Orang) | SAK (Rp) | Keanggotaan (Orang) | Keanggotaan (Rp) | Badan Usaha (Rp) | Badan Usaha (Rp) | Nilai Data (Rp) | Nilai Data (Rp) |
|----|----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 01             | 01              | 10              | 10       | 10                  | 10               | 10               | 10               | 10              | 10              |
| 2  | 01             | 02              | 20              | 20       | 20                  | 20               | 20               | 20               | 20              | 20              |
| 3  | 01             | 03              | 30              | 30       | 30                  | 30               | 30               | 30               | 30              | 30              |
| 4  | 01             | 04              | 40              | 40       | 40                  | 40               | 40               | 40               | 40              | 40              |
| 5  | 01             | 05              | 50              | 50       | 50                  | 50               | 50               | 50               | 50              | 50              |
| 6  | 01             | 06              | 60              | 60       | 60                  | 60               | 60               | 60               | 60              | 60              |
| 7  | 01             | 07              | 70              | 70       | 70                  | 70               | 70               | 70               | 70              | 70              |
| 8  | 01             | 08              | 80              | 80       | 80                  | 80               | 80               | 80               | 80              | 80              |
| 9  | 01             | 09              | 90              | 90       | 90                  | 90               | 90               | 90               | 90              | 90              |
| 10 | 01             | 10              | 100             | 100      | 100                 | 100              | 100              | 100              | 100             | 100             |

Gambar 2.3. Online Data System (ODS)

## 5. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan sistem informasi terpadu yang berisi data dan informasi tentang industri nasional. Ruang lingkup SIINas meliputi proses pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian informasi, dalam rangka untuk menerapkan kebijakan pengembangan industri yang baik dan efektif yang didukung data yang valid dan up to date. Up dating data pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) wajib dilakukan oleh masing-masing industri. Data ke SIINas, yang berisi antara lain: kapasitas terpasang, mesin yang digunakan, kebutuhan bahan baku, penggunaan energi, penggunaan air baku, pengolahan limbah dan sebagainya.



Gambar 2.4. Aplikasi SIINas

Untuk mendapatkan Akun, perusahaan harus melakukan : registrasi di Website SIINas yang beralamat [siinas.kemenperin.go.id](http://siinas.kemenperin.go.id) proses ini hanya dilakukan satu kali saja. Secara garis besar proses pendaftaran akun terbagi atas empat tahap, sebagai berikut:

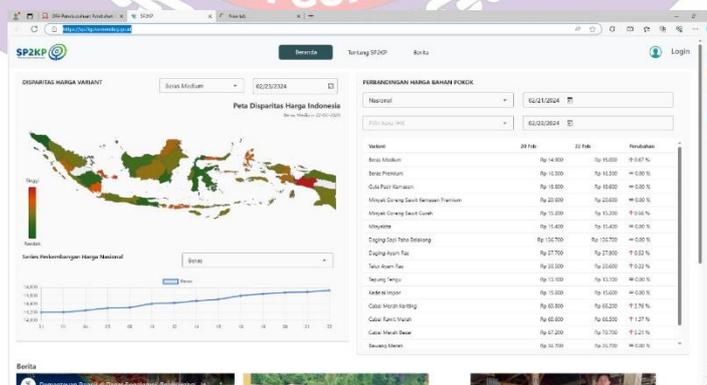
1. Melakukan registrasi secara online melalui website SIINas
2. Menyiapkan dokumen asli
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - b. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Tetap (bagi perusahaan industri);
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (jika ada),
  - d. Tanda Daftar Perusahaan,
  - e. Angka Pengenal Importir Produsen/Umum (jika ada).
  - f. Surat Kuasa dari perusahaan yang dibubuhi materai.

3. Membawa dokumen asli untuk di validasi pada unit pelayanan public

## 6. Aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (Sp2kp)

merupakan website pusat informasi mengenai harga pangan yang digagas oleh Kementerian Perdagangan. Mengacu pada UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan Perpres No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting), Kementerian Perdagangan (Kemendag) diberi tugas dan wewenang untuk menjaga stabilitas harga serta kecukupan ketersediaan bapokting di masyarakat, dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya melalui pengendalian inflasi pangan. Kemendag bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan serta pelaporan data harga dan stok/pasokan bapokting secara harian melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

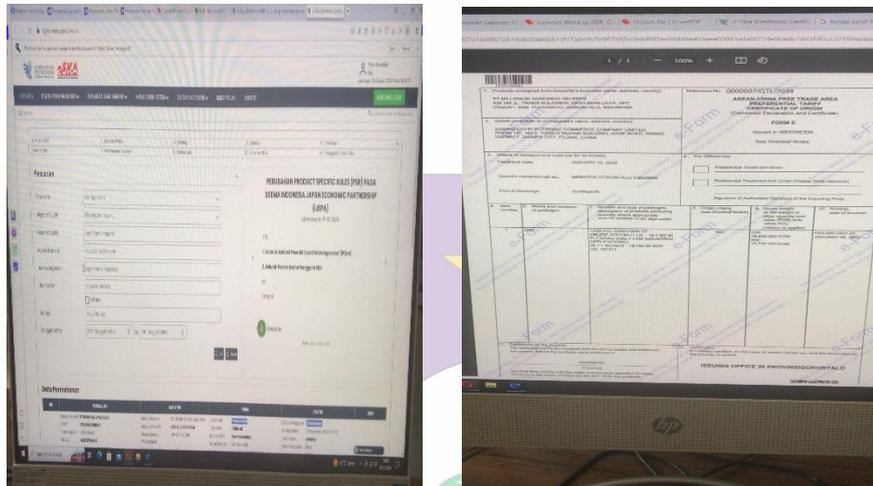
Aplikasi Pemantauan Pasar Komoditas Bahan Pokok adalah sebuah bukti akan keseriusan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan untuk mengontrol dan mengawasi pergerakan arus perdagangan komoditas strategis di seluruh Indonesia, Karena dengan adanya Aplikasi Pemantauan Pasar Komoditas Bahan Pokok ini diharapkan dapat terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan yang akan mempertajam dan memperjelas indikasi-indikasi sistem perdagangan dan arus lalu-lintas komoditas, selain itu dengan tersedianya data harga yang lengkap, kontinyu dan mutakhir, pada Aplikasi ini akan memungkinkan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan, untuk menjadi lebih tanggap terhadap indikasi-indikasi.



Gambar 2.5. Aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (Sp2kp)

## 7. E-SKA (Elektronik Surat Keterangan Asal)

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.



Gambar 2.6. E-SKA (Elektronik Surat Keterangan Asal)

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan, selanjutnya dari hasil pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tertera pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Skala Penilaian Capaian Kinerja

| No | KARITERIA     | INTERVAL REALISASI (%) | KODE        |
|----|---------------|------------------------|-------------|
| 1  | Sangat Baik   | 91 (= 100              | Hijau Tua   |
| 2  | Tinggi        | 76 (= 90               | Hijau Muda  |
| 3  | Sedang        | 66 (= 75               | Kuning Tua  |
| 4  | Rendah        | 51 (= 65               | Kuning Muda |
| 5  | Sangat Rendah | (= 50                  | Merah       |

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan peran sektor koperasi UKM industri dan perdagangan dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

| No | Tujuan strategis                                 | Indikator Kinerja       | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria/<br>Kode |
|----|--|-------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------|
| 1  | Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,67   | 4,5       | 79,37       |                   |
|    |  | Inflasi (%)             | 4-5    | 3,88      | 103,09      |                   |

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki 2 (dua) indikator tujuan strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2023, indikator tujuan strategis tersebut terdiri atas :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo tahun 2023 mencapai 79,37% dengan realisasi sebesar 4,5%. dari target yang ditetapkan 5,67%.

b. Inflasi

Target inflasi Provinsi Gorontalo yang ditetapkan sebesar 4-5% dengan realisasi sebesar 3,88% dengan tingkat capaian sebesar 103,89 %

Pencapaian tujuan strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3. Tingkat Pencapaian sasaran Strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                  | Target     | Realisasi    | Capaian (%) | Kriteria/<br>Kode |
|----|---|--|------------|--------------|-------------|-------------------|
|    |   |  |            |              |             |                   |
| 1  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan                         | Nilai SAKIP (%)                                    | 74,5       | 78,41        | 105,25      |                   |
| 2  | Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) | Jumlah Koperasi Berkualitas (koperasi)             | 20         | 22           | 110         |                   |
|    |   | Jumlah UKM yang berdaya saing (UKM)                | 60         | 50           | 83,34       |                   |
|    | Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) | Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah (%) | 0,78       | -36,34       | -4758,9     |                   |
|    | Meningkatnya nilai ekspor (USD)                               | Jumlah Nilai Ekspor (USD)                          | 14.102.573 | \$37.959.205 | 269         |                   |

Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo memiliki 5 (lima) indikator sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan srategis Provinsi Gorontalo.

a. Nilai sakiip

Capaian indikator nilai sakiip Dinas Kumperindag provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 105,25%, dari target 74,5% dan realisasi 78,41%.

b. Jumlah koperasi Berkualitas

adapun target jumlah koperasi berkualitas tahun 2023 sebesar 20 UKM dengan realisasi sebesar 22 UKM. Sehingga capaian jumlah koperasi berkualitas sebesar 110%.

Capaian indikator koperasi berkualitas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan.

c. Jumlah UKM yang Berdaya Saing

capaian jumlah UKM yang Berdaya saing 83,34% dengan realisasi 50 UKM dari target 60 UKM. Indikator UKM yang berdaya saing antara lain adanya peningkatan produktifitas, peningkatan pangsa pasar sertapertumbuhan output. UKM ini telah megikuti kurasi produk yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan Bank Indonesia

d. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah (%)

Di tahun 2023 realisasi -36,34% dari target 0,78% . Indikator kinerja urusan industri “Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah ” Tahun 2023 diperoleh dari :

$$\frac{(\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri thn } n-1)}{(\text{Jumlah Industri Tahun } n-1) \times 100\%}$$

Dimana :

Jumlah industri tahun 2023 = 10.039 3IKM

Jumlah industri tahun 2022 = 15.767 IKM

\* jumlah IKM 2023 berdasarkan data SIIDIG per 18 Januari 2023

Data jumlah industri tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 karena masih terdapat beberapa Kabupaten yang belum fix hingga 18 Januari 2023 untuk melakukan inputan data IKM pada aplikasi SIIDG. Antara lain Kabupaten Pohuwato. Sehingga capaian untuk indikator sasaran ini tidak mencapai target

e. Jumlah Nilai Ekspor

Di tahun 2023 capaian sebesar 269%. Dari target \$14.102.57 dengan \$37.959.205 .

Jumlah Nilai Ekspor Tahun 2023 berjumlah \$37.959.205 data ini diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan Bea Cukai Gorontalo.

Komoditi Export 2023 yaitu Ikan tuna, molases, santan beku, jagung, wood pelet, briket, minyak mentah

## 2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Yang Lalu

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita serta pertumbuhan export dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Lalu

| Tujuan                               | Indikator Tujuan    | Capaian |       |       |        |      |
|--------------------------------------|---------------------|---------|-------|-------|--------|------|
|                                      |                     | 2019    | 2020  | 2021  | 2022   | 2023 |
| Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | Pertumbuhan Ekonomi | 89,01   | -0,47 | 40,37 | 100,75 |      |
|                                      | Laju Inflasi (%)    | 78,2    | 22,88 | 75,73 | 43,94  |      |

| Tujuan   | Indikator Tujuan    | Capaian |      |      |      |        |
|--|---------------------|---------|------|------|------|--------|
|  |                     | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   |
| Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat | Pertumbuhan Ekonomi |         |      |      |      | 79,37  |
|  | Laju Inflasi (%)    |         |      |      |      | 103,09 |

- Untuk Indikator Pertumbuhan Ekonomi, ditahun 2023 capaian kinerja mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 96,61 % dan sebesar 13,2% ditahun 2019.
- Capaian Laju Inflasi ditahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 134,62%. capaian inflasi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2019 hingga 2022 terus mengalami kenaikan. Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 134,62 persen, Begitupun jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 36,13. Tahun 2019 naik sebesar 31,83 persen.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah, maka didukung pula oleh tujuan strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian

Dari tujuan strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tersebut maka untuk pencapaian sasaran strategis didukung oleh capaian 5 (enam) indicator kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Capaian dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Lalu

| Sasaran Strategis                       | Indikator Kinerja         | Capaian     |         |         |         |      |
|---|---------------------------|-------------|---------|---------|---------|------|
|   |                           | 2019        | 2020    | 2021    | 2022    | 2023 |
| Meningkatnya Daya Saing Koperasi & UMKM | Koperasi Berkualitas      | 6 Koperasi  |         |         |         |      |
|   | UMKM Naik Kelas           | 70 UKM      |         |         |         |      |
| Meningkatnya Koperasi Sehat             | Persentase Koperasi Sehat |             | 333,80% | 300,30% | 343,80% |      |
| Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas      | Rata-Rata UKM Naik Kelas  |             | 120%    | 128%    | 132%    |      |
| Meningkatnya Produksi IKM               | ~ IKM Yang Bersertifikat  | 44 IKM      |         |         |         |      |
|   | ~ Nilai Produksi IKM (Rp) | 767.899.395 |         |         |         |      |
| Meningkatnya Pertumbuhan IKM            | Jumlah Penumbuhan IKM     |             | 452%    | 658%    | 424%    |      |
|   |                           |             |         |         |         |      |

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Capaian         |        |         |       |                   |
|---|--|-----------------|--------|---------|-------|-------------------|
|   |  | 2019            | 2020   | 2021    | 2022  | 2023              |
| Meningkatnya Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri & Meningkatkan Akses Pasar Luar Negeri | ~ Perdagangan Antar Pulau                                  | 3308 Kali       |        |         |       |                   |
|   | ~ Ekspor Komoditi Unggulan Daerah                          | 342 kali ekspor |        |         |       |                   |
| Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri   | Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat |                 | 57,21% | 18,14%  | 8,84% |                   |
| Meningkatnya Perlindungan Konsumen & Pengawasan Perdagangan                             | Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan                 |                 | 125%   | 108,84% | 100%  |                   |
|   |  |                 |        |         |       |                   |
| <b>meningkatnya tata kelola pemerintahan</b>  | <b>Nilai SAKIP</b>   |                 |        |         |       | <b>105%</b>       |
| <b>Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)</b>                    | <b>Jumlah Koperasi Berkualitas</b>                         |                 |        |         |       | <b>110%</b>       |
|   | <b>Jumlah UKM yang berdaya saing</b>                       |                 |        |         |       | <b>83,34</b>      |
| <b>Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)</b>                    | <b>Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah</b>      |                 |        |         |       | <b>- 4758,98%</b> |
| <b>Meningkatnya nilai ekspor (USD)</b>  | <b>Jumlah Nilai Ekspor</b>                                 |                 |        |         |       | <b>269%</b>       |

Untuk sasaran strategis dinas Kumperindag tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.). Adapun capaian di tahun 2019 masih mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2017-2022. Kemudian untuk 2020 hingga 2022 mengacu pada renstra revisi berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Indikator kinerja tahun 2023 merupakan indikator baru yang mengacu pada Renstra 2023-2026 sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja ditahun sebelumnya. Berdasarkan tabel tersebut di atas capaian dari 5 (lima) indikator kinerja dari tahun 2023 sebagai berikut :

a. Nilai Sakib

Capaian indikator kinerja nilai sakib sebesar 105%. Untuk indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Jumlah Koperasi Berkualitas

Capaian indikator kinerja jumlah koperasi berkualitas 110%. Untuk indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Jumlah UKM yang Berdaya Saing

Capaian indikator kinerja Jumlah UKM yang Berdaya Saing 83,34%

Dengan indikator penilaian dari produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output.

Untuk indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah - 4758,98 %. Untuk indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis

Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Jumlah Nilai Ekspor

Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor 269 %. Untuk indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari beberapa indikator kinerja dibandingkan dengan target RPD dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPD

| Tujuan Strategis                                 | Indikator Kinerja   | Target RPD | Realisasi sampai dengan Tahun 2023 | Capaian (%) | Kriteria/ Kode |
|--|---------------------|------------|------------------------------------|-------------|----------------|
| Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat | Pertumbuhan Ekonomi | 5,67       | 4,5                                | 79,36       |                |
|  | Laju Inflasi (%)    | 4-5        | 3,88                               | 103,09      |                |

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa untuk capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Eknomi

Capaian dari indicator kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan target RPD pada tahun 2023 ini capaian kinerjanya sebesar 79,37% dengan kriteria tinggi.

## b. Laju Inflasi

Capaian indikator laju inflasi Provinsi Gorontalo jika dibandingkan dengan dokumen perencanaan RPD adalah 103,09%, yaitu dari target sebesar 4-5% dengan realisasinya sebesar 3,88%.

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Kumperindag maka didukung juga oleh capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yaitu 5 (lima) indikator kinerja yang akan dibandingkan dengan target Renstra. Hal dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                              | Target Renstra | Realisasi    | Capaian (%) | Kriteria |
|---|--|----------------|--------------|-------------|----------|
|   |  |                |              |             | /Kode    |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan                         | Nilai SAKIP                                    | 74,5           | 78,41        | 105,25      |          |
| Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) | Jumlah Koperasi Berkualitas                    | 20             | 22           | 110         |          |
|   | Jumlah UKM yang berdaya saing                  | 60             | 50           | 83,33       |          |
| Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) | Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah | 0,78%          | -34,33%      | 4.401,28    |          |
| Meningkatnya nilai ekspor (USD)                               | Jumlah Nilai Ekspor                            | \$14.102.573   | \$37.959.205 | 269         |          |

Dari tabel tersebut di atas capaian dari 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut adalah :

### a. Nilai Sakib

capaian indicator sasaran strategis di tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 telah mencapai target yang telah ditetapkan sebanyak 105,25%. Dari target 74,5% dan realisasi 78,41%.

### b. Jumlah Koperasi Berkualitas

Capaian indikator kinerja jumlah koperasi berkualitas jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 sebesar 110%. Dengan target 20 koperasi dan realisasi 22 koperasi. Dimana untuk koperasi berkualitas

berdasarkan pemeringkatan. Aspek pemeringkatannya yaitu kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat koperasi terhadap anggota, manfaat koperasi terhadap masyarakat. Dengan hasil pemerimngkatan sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas

b. Jumlah UKM yang Berdaya Saing

Capaian indikator kinerja Jumlah UKM yang Berdaya Saing jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 sebesar 83,34%. Dengan target 60 UKM dan realisasi 50 UKM

Capaian indikator kinerja Jumlah UKM yang Berdaya Saing sebesar 83,34%, capaian ini becapaian ini berdasarkan target pada dokumen Renstra 60 UKM Dengan indikator penilaian dari produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output.

c. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah jika dibandingkan dengan target Renstra 2023-2026 dan realisasi tahun 2023 sebesar -4758,98 %.

d. Jumlah Nilai Ekspor

Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor jika dibandingkan dengan dokumen renstra 2023-2026 adalah sebesar 269 %, dimana target renstra \$14.102.573 dengan realisasi \$37.959.205

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi dan indicator kinerja lainnya dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Standar Nasional

| Tujuan Strategis                                 | Indikator Kinerja       | Realisasi Kinerja Pemprov Gorontalo | Standar Nasional (%) | Capaian (%) | Kriteria/ Kode |
|--|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,5                                 | 5                    | 90          |                |
|  | Laju Inflasi (%)        | 3,88                                | 3±1                  | 129,34      |                |

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa untuk capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Capaian dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2023 sebesar 90% dengan kriteria tinggi.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan menjadi 5,05 persen sedikit melebihi proyeksi pemerintah sebesar 5 persen, tetapi tetap menunjukkan ketahanan yang signifikan dalam konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor.

Capaian postif pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV-2023 tersebut ditopang dengan penguatan kinerja sejumlah komponen pada sektor lapangan usaha. Tercatat sektor konstruksi mampu tumbuh sebesar 7,68 persen (yoy) dan menjadi kontributor pertumbuhan terbesar kedua setelah industri pengolahan yang memiliki capaian sebesar 4,07 persen (yoy). Pertumbuhan impresif secara full year tahun 2023 juga ditopang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,82% (yoy), serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang mencapai 4,40 persen (yoy). Lebih lanjut dari sisa lapangan usaha, sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan yakni transportasi dan pergudangan sebesar 13,96 persen (yoy). Sedangkan pada sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPR) sebesar 9,83 persen (yoy).

b. Laju Inflasi

Capaian dari indikator kinerja laju inflasi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2023 ini capaian kinerjanya sebesar 129,34% dengan kriteria sedang yaitu realisasi 3,88% dan standar nasional  $3\pm 1$

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau.

pencapaian inflasi Indonesia tahun 2023 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target sasaran  $3\pm 1$ . Capaian inflasi tahun 2023 tersebut tercatat sebesar 2,61%

(yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022, yakni sebesar 5,51% (yoy).

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Kumperindag maka didukung oleh capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dari 5 (lima) indikator kinerja. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu realisasi kinerja sasaran strategis jika dibandingkan dengan standar nasional.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2023 dengan Standar Nasional

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                              | Realisasi    | Standar Nasional (%) | Capaian (%) | Kriteria |
|---|--|--------------|----------------------|-------------|----------|
|   |  |              |                      |             | /Kode    |
| Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan                           | Nilai SAKIP                                    | 78,41        | 70,88                | 90,40       |          |
| Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD) | Jumlah Koperasi Berkualitas                    | 22           | --                   | -           |          |
|   | Jumlah UKM yang berdaya saing                  | 50           |                      | -           |          |
|   | Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah | -34,33%      | --                   | -           |          |
|   | Jumlah Nilai Ekspor                            | \$37.959.205 | \$258,82 m           | 0,01        |          |

a. Nilai Sakib

capaian indikator sasaran strategis di tahun 2023 jika dibandingkan dengan standar nasional telah mencapai 90,40% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 70,88%. dan realisasi 78,41%.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB menjelaskan bahwa rata-rata nilai SAKIP Tahun 2023 pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75, pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02 dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68.

- b. Jumlah Koperasi Berkualitas  
Jumlah koperasi berkualitas tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional
- b. Jumlah UKM yang Berdaya Saing  
Realisasi jumlah UKM yang berdaya saing sebanyak 50 UKM. Tahun 2023 ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena sasaran strategis Kemenkop 2020-2024 adalah persentase UKM naik kelas.  
Dengan indikator penilaian untuk UKM yang berdaya saing yaitu dari sisi produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output.
- c. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah  
Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional
- d. Jumlah Nilai Ekspor  
Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor 0,01 %. Hal ini jika dibandingkan dengan standar nasional \$258,82 (milyar) dan realisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebanyak \$37.959.205.  
Nilai eksport Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar USD 258,82 miliar, sedikit dibawah capaian eksport tahun 2022 sebesar USD 291,90 miliar.

#### **5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan indicator kinerja Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 4,5 persen dari target 5,67 persen dengan capaian 79,37persen. Indikator Pertumbuhan Ekonomi ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 21,22 persen dan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 96,61persen dan di tahun 2019 sebesar 13,2 persen. Adapun capaian dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo jika dibandingkan dengan target RPD pada tahun 2023 ini mencapai 79,37persen dengan kriteria tinggi dan jika dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2023 sebesar 90persen dengan kriteria tinggi.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan menjadi 5,05persen sedikit melebihi proyeksi pemerintah sebesar

5persen, tetapi tetap menunjukkan ketahanan yang signifikan dalam konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor.

Solusi yang dilakukan pemerintah daerah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi agar dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, stimulus bagi UMKM, meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan mutu dan keamanan produk pangan serta menggerakkan roda ekonomi di daerah. Pemprov Gorontalo juga terus mendorong investasi untuk mengelola potensi daerah di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi daerah dan nasional serta kemudahan investasi di daerah.

**b. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja Laju Inflasi**

Target inflasi Provinsi Gorontalo yang ditetapkan sebesar 4-5persen dengan realisasi sebesar 3,88persen, tingkat capaian sebesar 103,89persen. Capaian Laju Inflasi ditahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 134,62persen. capaian inflasi tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dari tahun 2019 hingga 2022 terus mengalami kenaikan. Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 134,62 persen, Begitupun di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 36,13 persen dan tahun 2019 sebesar 31,83persen.

Capaian ini jika dibandingkan dengan dokumen perencanaan RPD adalah 103,09 persen yaitu dari target sebesar 4-5 persen dengan realisasinya sebesar 3,88 persen. Capaian dari indikator kinerja laju inflasi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2023 ini capaian kinerjanya sebesar 129,34 persen dengan kriteria sedang dengan realisasi 3,88 persen dari standar nasional  $3 \pm 1$ . Pencapaian inflasi Indonesia Tahun 2023 terjaga stabil dan terkendali pada rentang target  $3 \pm 1\%$ . Capaian inflasi tahun 2023 tersebut tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 yakni sebesar 5,51 persen (y0y).

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Adapun beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menekan inflasi yaitu adanya komitmen dari pemerintah daerah yang terlihat dari intensitas kehadiran pejabat Gubernur dalam setiap High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai respon terhadap situasi inflasi yang meningkat serta upaya pelaksanaan operasi pasar murah khususnya untuk komoditi cabai, bawang merah, minyak goreng, beras serta komoditi lainnya (sesuai juknis) yang menjadi penyumbang utama inflasi. Selain gelar pasar murah di Kabupaten/Kota, Pemprov Gorontalo menggelar pasar murah di Kabupaten/kOra, Pemprov Gorontalo menggelar pasar murah cabai dan tomat di pasar sentral Kota Gorontalo sebanyak 4 kali dalam waktu 4 hari. Pasar murah ini menjual Cabai Rawit dan Tomat yang telah disubsidi, yaitu Cabai Rawit sebanyak 3.150 Kilogram dan Tomat sebanyak 2000 Kilogram. Pedagang di Pasar Sentral menjual cabai yang telah disubsidi tersebut dengan harga Rp.15.000 perkilogram, (yang dikemas Rp.3000/200 gram/orang), dari harga jual cabai pada saat itu Rp.140 ribu per kilogram, Sedangkan tomat yang telah disubsidi dijual dengan harga Rp.5 ribu/kilogram, yang dikemas Rp.2500/250 gram/orang), dari harga jual tomat saat itu Rp.30.000/kilogram

TPID Provinsi Gorontalo juga intens mengkampanyekan belanja bijak kepada masyarakat. Yang bertujuan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan dan imbauan agar pedagang tidak menaikkan harga barang terlebih menjelang natal dan tahun baru. Upaya ini diharapkan dapat meredakan tekanan inflasi dan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga bahan pokok di Gorontalo

**c. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP**

Capaian indikator nilai sakip Dinas Kumperindag provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 105,25%, dari target 74,5% dan realisasi 78,41%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

capaian indikator sasaran strategis di tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 telah mencapai target yang telah ditetapkan sebanyak 105,25persen dari target 74,5persen dan realisasi 78,41persen. Dan bila dibandingkan dengan standar nasional telah mencapai 90,40persen dari target yang telah ditetapkan sebanyak 70,88persen. dan realisasi 78,41persen.

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa rata-rata nilai SAKIP Tahun 2023 pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75 pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68.

SAKIP adalah alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kickoff perbaikan SAKIP dengan menghadirkan seluruh pimpinan OPD, melakukan identifikasi OPD yang mendukung enam program unggulan provinsi, menyempurnakan rumusan indikator kinerja utama pada level OPD, menyusun pedoman akuntabilitas kinerja, memperbaiki laporan kinerja, meningkatkan kapasitas evaluator internal SAKIP serta mendorong komitmen pimpinan yang akan menjadi penentu keberhasilan SAKIP.

**d. Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)**

Adapun target jumlah koperasi berkualitas tahun 2023 sebesar 20 UKM dengan realisasi sebesar 22 UKM. Sehingga capaian jumlah koperasi berkualitas sebesar 110%. Capaian indikator koperasi berkualitas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo

Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja jumlah koperasi berkualitas tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 sebesar 110% yaitu dengan target 20 koperasi dan realisasi 22 koperasi. Dimana untuk koperasi berkualitas berdasarkan pemeringkatan. Aspek pemeringkatannya yaitu kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat koperasi terhadap anggota, manfaat koperasi terhadap masyarakat. Dengan hasil pemeringkatan sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas. Indikator Jumlah koperasi berkualitas tidak terdapat pada standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan.

Target yang diharapkan dapat tercapai dengan mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perkoperasian yang diberikan secara berkala kepada setiap koperasi yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Pembinaan Koperasi lebih menitik beratkan kepada koperasi yang telah memperoleh Penguatan Modal di tahun 2022, sehingga pemanfaatan sesuai peruntukannya dan pencatatannya sesuai sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong bertambahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ke depan semakin banyak Koperasi yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) serta mengurus Ijin Usaha Koperasi sesuai usaha atau KBLI (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) yang ada di anggaran dasar koperasi sebagai salah satu legalitas usaha, serta Mendorong transformasi koperasi modern di Gorontalo.

e. **Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) dengan indikator kinerja Jumlah UKM yang berdaya saing**

Capaian jumlah UKM yang Berdaya saing 83,34% dengan realisasi 50 UKM dari target 60 UKM. Indikator UKM yang berdaya saing antara lain adanya peningkatan produktifitas, peningkatan pangsa pasar serta pertumbuhan output. UKM ini telah mengikuti kurasi produk yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan Bank Indonesia. UKM yang berdaya saing dilihat dari aspek produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 sebesar 83,34% dengan target 60 UKM dan realisasi 50 UKM. Tahun 2023 ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional dimana pada Renstra Kemenkop 2020-2024 tidak mencantumkan indikator UKM yang berdaya saing.

UKM yang berdaya saing dapat dilihat dari sisi produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output.

Pencapaian diharapkan dapat terus bertahan dengan terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada UKM melalui coaching clinic dan mentoring bagi UMKM, stimulan bagi UMKM, Peningkatan SDM bagi pelaku UMKM melalui E-commerce, marketplace. Peningkatan kualitas dan kontinuitas UMKM melalui kegiatan advokasi/Bimtek/Workshop.

- f. Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah**  
Di tahun 2023 realisasi -36,34% dari target 0,78% . Indikator kinerja urusan industri Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah tahun 2023 diperoleh dari :

$$\frac{(\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri thn } n-1)}{(\text{Jumlah Industri Tahun } n-1)} \times 100\%$$

Dimana :

Jumlah industri tahun 2023 = 10.039 3IKM

Jumlah industri tahun 2022 = 15.767 IKM

jumlah IKM 2023 berdasarkan data SIIDIG per 18 Januari 2023. Data jumlah industri tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 karena masih terdapat beberapa Kabupaten yang belum melakukan inputan data IKM pada aplikasi SIIDG hingga 18 Januari 2023, antara lain Kabupaten Pohuwato sehingga capaian untuk indikator sasaran ini tidak mencapai target. Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah -4758,98%. indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur

Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan industri kecil menengah jika dibandingkan dengan target Renstra 2023-2026 yaitu -101,34 %. dengan realisasi tahun 2023 sebesar -34,33 %. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional.

Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam mengembangkan IKM yaitu melalui pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas, penyerapan tenaga kerja, memanfaatkan potensi bahan baku lokal. Peningkatan mutu produk melalui program peningkatan sumber daya manusia IKM melalui bimtek peningkatan mutu produk, sertifikasi halal, PIRT serta stimulan bantuan bagi IKM.

**g. Meningkatnya nilai ekspor (USD) dengan indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor.**

Jumlah Nilai Ekspor Tahun 2023 berjumlah \$37.959.205 data ini diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan Bea Cukai Gorontalo. Komoditi Export 2023 yaitu Ikan tuna, molases, santan beku, jagung, wood pelet, briket, minyak mentah.

Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor 269 %. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor jika dibandingkan dengan dokumen Renstra 2023-2026 adalah sebesar 269 %, dimana target renstra \$14.102.573 dengan realisasi \$37.959.20. dari capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor sebesar 0,01 % jika dibandingkan dengan standar nasional \$258,82 (milyar) dan realisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebanyak \$37.959.205.

Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar USD 258,82 miliar, sedikit dibawah capaian ekspor tahun 2022 sebesar USD 291,90 miliar.

Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah ekspor yaitu meningkatkan promosi produk-produk lokal agar tingkat permintaan terhadap produk lokal unggulan semakin banyak. Alternatif solusi untuk meningkatkan promosi produk lokal seperti mengadakan pameran dagang (ITEI), memberi kemudahan para produsen barang ekspor yang hendak menjual produknya ke pasar internasional. Kemudahan yang diberikan pemerintah adalah mengurus perizinan dagang dan menyediakan fasilitas produksi berupa pelatihan inovasi produk. Dengan kemudahan tersebut pengusaha bisa menekan harga jualnya sehingga barang yang diproduksi mampu bersaing di pasar internasional, memilih komoditas ekspor unggulan.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumberdaya biaya dan sumberdaya manusia. Pada Tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah **Rp. 50.144.137.080,-** sementara target biaya Dinas Kumperindag tahun 2023 yaitu **Rp. 53.980.687.812,-** atau sebesar 92,89 %. Dengan demikian capaian tingkat efisiensi sebesar **3,92%**.

Tabel 3.10. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                              | Anggaran Induk        | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi (Rp).       | Capaian Output (%) | Capaian Keuangan (%) | Tingkat Efisiensi |
|---|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan                         | Nilai SAKIP                                    | 13.975.723.713        | 14.040.115.641             | 13.666.150.434        | 100                | 97,34                | 2,66              |
| Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah(Jumlah), | Jumlah Koperasi Berkualitas                    | 2.186.128.500         | 2.146.688.500              | 2.127.764.036         | 100                | 99,54                | 0,46              |
|   | Jumlah UKM yang berdaya saing                  | 7.083.828.100         | 17.862.290.100             | 17.809.898.610        | 100                | 99,56                | 0,44              |
| Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) | Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah | 2.605.226.405         | 3.500.429.405              | 3.474.657.903         | 99,95              | 99,34                | 0,61              |
| Meningkatnya nilai ekspor (USD)                               | Jumlah Nilai Ekspor                            | 3.865.228.814         | 16.431.164.166             | 13.065.666.097        | 95,43              | 89,84                | 5,59              |
| <b>JUMLAH</b>   |  | <b>29.716.135.532</b> | <b>53.980.687.812</b>      | <b>50.144.137.080</b> | <b>96,81</b>       | <b>92,89</b>         | <b>3,92</b>       |

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa efisiensi pemanfaatan sumber daya pada 5 (lima) sasaran strategis dinas rata-rata antara 0,44 sampai dengan 5,59 persen.

a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP.

Tingkat efisiensi sebesar 2,66%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kickoff perbaikan SAKIP dengan menghadirkan seluruh pimpinan OPD, melakukan identifikasi OPD yang mendukung enam program unggulan provinsi, menyempurnakan rumusan indikator kinerja utama pada level OPD, menyusun pedoman akuntabilitas kinerja, memperbaiki laporan kinerja, meningkatkan kapasitas evaluator internal SAKIP serta mendorong komitmen pimpinan yang akan menjadi penentu keberhasilan SAKIP.

b. Meningkatkan kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) dengan indikator Jumlah Koperasi Berkualitas

Tingkat efisiensi sebesar 0,46%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perkoperasian yang diberikan secara berkala kepada setiap koperasi yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Pembinaan Koperasi lebih menitik beratkan kepada koperasi yang telah memperoleh Penguatan Modal di tahun 2022, sehingga pemanfaatan sesuai peruntukannya dan pencatatannya sesuai sehingga dapat dipertanggungjawabkan Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong bertambahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ke depan semakin banyak Koperasi yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) serta mengurus Ijin Usaha Koperasi sesuai usaha atau KBLI (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) yang ada di anggaran dasar koperasi sebagai salah satu legalitas usaha, serta Mendorong transformasi koperasi modern di Gorontalo.

c. Meningkatkan kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), engan indikator Jumlah UKM yang berdaya Saing

Efisiensi anggaran sebesar 0,44 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada UKM melalui coaching clinic dan mentoring bagi UMKM. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui stimulan bagi UMKM, Peningkatan kualitas dan kontinuitas UMKM melalui

kegiatan advokasi/Bimtek/Workshop, Peningkatan SDM bagi pelaku UMKM melalui E-commerce, marketplace melalui program pelatihan dan pendampingan dengan berbagai marketplace dan mengupayakan kebijakan afirmasi penggunaan produk lokal dalam pencapaian target

- d. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) dengan indikator Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah Tingkat efisiensi sebesar 0,61%. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam mengembangkan IKM yaitu melalui pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas, penyerapan tenaga kerja, memanfaatkan potensi bahan baku lokal. Peningkatan mutu produk melalui program peningkatan sumber daya manusia IKM melalui bimtek peningkatan mutu produk, sertifikasi halal, PIRT serta fasilitasi bagi IKM melalui stimulan bantuan bagi IKM (bahan/peralatan, tempat produksi dan fasilitasi listrik).
- e. Meningkatnya nilai ekspor (USD) dengan indikator Jumlah Nilai Ekspor Tingkat efisiensi sebesar 5,59 %. Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah ekspor yaitu meningkatkan promosi produk-produk lokal agar tingkat permintaan terhadap produk lokal unggulan semakin banyak. Alternatif solusi untuk meningkatkan promosi produk lokal seperti mengadakan pameran dagang (ITEI), memberi kemudahan para produsen barang ekspor yang hendak menjual produknya ke pasar internasional. Kemudahan yang diberikan pemerintah adalah mengurus perizinan dagang dan menyediakan fasilitas produksi berupa pelatihan inovasi produk. Dengan kemudahan tersebut pengusaha bisa menekan harga jualnya sehingga barang yang diproduksi mampu bersaing di pasar internasional, memilih komoditas ekspor unggulan.

## **7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023. Program-program tersebut dilaksanakan oleh sekretariat dan Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Program-program yang telah diselenggarakan sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**

Kegiatan :

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**B. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**

Kegiatan :

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**C. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**

Kegiatan :

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**D. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

**E. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**

Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

**F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

**G. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**

~ Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

~ Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

**H. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**

Kegiatan :

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

#### I. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kegiatan :

- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

#### URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

#### J. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

#### K. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional SIINas)

#### L. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2023.

Adapun output dari program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

#### *Sasaran Strategis I : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan*

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan.

Pada program ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

❖ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen). Pagu awal sub kegiatan ini berjumlah Rp. 520.283.400,- kemudian terdapat revisi sebesar Rp. 59.760.500,- pada beberapa belanja ke sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah. Sehingga total pagu setelah perubahan sebesar Rp. 460.217.152,- dengan realisasi Rp. 460.217.152,- .

Di tahun 2023 telah dihasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 Dokumen perencanaan yaitu Dokumen renja, renstra, RAK, RKA, KAK, RAB, SIRUP

*Output* dari kegiatan ini adalah :

- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bidang Koperasi UMKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo di Kabupaten Boalemo
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Koordinasi Pelaksanaan Program di kab/Kota, Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Bimtek Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (6 laporan)

Pagu awal untuk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 410.253.000,- kemudian mendapat tambahan anggaran melalui revisi anggaran sebesar Rp. 59.760.500,- dari beberapa belanja pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, sehingga total pagu setelah perubahan berjumlah Rp. 470.013.500,- dengan realisasi sejumlah Rp. 469.853.960,- dan Silva kegiatan berjumlah Rp. 159.540,- dari beberapa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sub kegiatan ini telah mencapai realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 99,97%.

Di tahun 2023 telah dihasilkan 8 Dokumen Monitoring dan Evaluasi yaitu Dokumen Rencana Aksi, LKPJ, LPPD, laporan evaluasi renja per triwulan, E-Monev, Lakip, Laporan Tahunan (LAPKIN APBN), laporan tahunan APBD masing-masing bidang

*Output* dari kegiatan ini adalah :

- Forum OPD Bidang Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Tingkat Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 23-24 Februari 2023 yang diikuti oleh aparat Pembina Dinas Kumperindag Kabupaten/kota
- Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka koordinasi pelaksanaan program/kegiatan, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan, Pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Koordinasi Pelaksanaan Program di kab/Kota, Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penyusunan Program.

❖ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. *Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (87 orang/bulan). adapun pagu awal sub kegiatan ini Rp. 9.525.980.913,- di tahun 2023 terdapat revisi tambahan TPP(fungsional) Rp. 308.500.000,- dan revisi penyesuaian gaji/TPP Rp. 357.249.220,- sehingga total revisi Rp. 48.749.220,-. Pagu setelah perubahan Rp. 9.477.231.693,- dengan realisasi Rp. 9.184.737.481,- silva Rp. 292.494.212,- yang terdiri dari sisa gaji pokok PNS, tunjangan keluarga PNS, tunjangan fungsional PNS, tunjangan fungsional umum PNS. Tunjangan beras PNS, tunjangan PPh, pembulatan gaji PNS serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS

b. *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*

Indikator Output Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 laporan).

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 115.872.140,- dengan realisasi Rp. 115.872.140,- dan silva Rp. 66.860,- dari sisa belanja yang tidak dapat dibelanjakan lagi.

❖ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator output yaitu jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sebanyak 87 orang Pagu kegiatan ini hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp. 377.474.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 377.166.100,- (99,92%)

Output kegiatan ini adalah keikutsertaan pada diklat peningkatan SDM Aparatur (12 orang), E-PPID (4 orang), Diklat Srikandi (4 orang), Aset (1 orang), SIPD (5 orang), Study komparasi Makassar (5 orang), study komparasi manado (7 orang), Tim Digital Talent Scholarship (2 orang), Praktek Reformasi Birokrasi (3 orang).

❖ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator output yaitu Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan (30 paket)

Output kegiatan ini adalah penyediaan sarana prasarana perkantoran (belanja modal), perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, suku cadang alat angkutan dan bahan bakar/pelumas. dengan target 100% dan capaian keuangan 99,72%. Pagu awal sebesar Rp. 1.540.897.000,- kemudian revisi pada beberapa rekening belanja yang bersesuaian dengan total senilai (182.487.900,-) Sehingga pagu sesudah perubahan menjadi Rp. 1.358.409.100,- dengan realisasi Rp. 1.354.542.233,- Silva Rp. 3.866.867,-.

❖ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 laporan). Pagu anggaran induk untuk sub kegiatan ini yaitu Rp. 1.484.896.400,- dan pagu setelah perubahan Rp. 1.780.525.448,- dengan target fisik 100% dan capaian 100% serta realisasi keuangan 95,69% . Ditahun 2023 sub kegiatan ini mendapat tambahan anggaran melalui APBD-P sebesar Rp. 220.000.000,-(honorarium PTT) dan revisi pada beberapa rekening belanja total Rp. 75.629.048,-.

**Sasaran Strategis II : Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)**

**1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan **Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel**

Pagu awal program ini sebesar Rp. 340.000.200,- kemudian terdapat revisi pada belanja hadiah yang bersifat perlombaan kegiatan penilaian dan penghargaan koperasi berprestasi sebesar Rp. 200.000.000,- ke belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (stimulan pengembangan produk bagi UMKM) program pengembangan UMKM berdasarkan persetujuan DPR No. 160/DPRD/1212/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 sehingga anggaran setelah perubahan untuk kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar Rp. 140.000.200,- dengan realisasi sebesar Rp.139.893.350,-. Dengan silva sebesar Rp. 106.850,- (sisa pada item belanja ATK, kertas & cover, bahan komputer, makan minum rapat, makan minum aktifitas lapangan, perjalanan dinas biasa)

*Outcome* dari program ini adalah jumlah koperasi sehat sebanyak 20 koperasi dengan capaian 22 koperasi.

*Output Kegiatan* ini adalah :

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
- Meningkatkan fungsi Pengawasan Koperasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
- Meningkatkan Kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ini dilakukan pada Koperasi Primer Provinsi Gorontalo serta monitoring dan evaluasi koperasi berprestasi

b. Rapat Ekspose Hasil Pengawasan Koperasi yang menghasilkan laporan hasil pengawasan koperasi Se-Provinsi Gorontalo baik yang didanai APBD dan APBN (Satgas Pengawas Koperasi Se-Provinsi Gorontalo)

Tujuan Pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyatukan persepsi bersama dalam pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota Se-Provinsi Gorontalo, sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan koperasi yang efektif dan efisien di Provinsi Gorontalo serta Memperkuat komitmen penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan koperasi di Provinsi Gorontalo.

Peserta Kepala Dinas, Kepala Bidang Koperasi, Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo 38 Orang.

- c. Dalam pencapaian kinerja program yaitu jumlah koperasi sehat terdapat 4 (empat) aspek pemeriksaan kesehatan koperasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi No. 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat diberikan sertifikat kesehatan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus ditindaklanjuti dengan sanksi administratif. Sertifikat kesehatan atau sanksi administratif ditetapkan oleh deputi/perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan LHPKK.

Adapun capaian Koperasi sehat tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.11.**  
**Jumlah Usaha Simpan pinjam Oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatanya**  
**Per 31 Desember 2023**

| N O | NAMA KOPERASI                                   | NO DAN TGL BADAN HUKUM KOPERASI  | ALAMAT KOPERASI  | JENIS KOPERASI | KET.  |
|-----|---|--|--|----------------|-------|
| 1.  | KSP KOPERASI PRIMER KESEHATAN DAERAH            | 372/BH/V, Tgl. 26 November 1982<br>AHU-0002766.AH.01.38.TAHUN 2022<br>23 Desember 2022 | Jl. H. Moh. Non Pango, SE<br>Kec. Limboto Kab. Gorontalo | S. Pinjam      | Sehat |
| 2.  | KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WIYOWA      | 07/BH/518/DTKTK/IV/04<br>13 April 2004   | Kel. Limba U II Kec. Kota Tengah<br>Kota Gorontalo       | Konsumen       | Sehat |
| 3.  | KOPERASI SERBA USAHA KARYA PRASETYA             | 36/BH/XXII/VII/2015<br>15 Juli 2015  | Kel. Botu Kec. Kota Timur<br>Kota Gorontalo              | Konsumen       | Sehat |
| 4.  | KSP KARYA CIPTA DANA PROVINSI GORONTALO         | 33/BH/XXII/XII/2014<br>22 Desember 2014  | Jl. Bulila Desa Bulota<br>Kab. Gorontalo                 | S. Pinjam      | Sehat |
| 5.  | KSP AL HIKMAT PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO | 31/BH/XXII/III/2014<br>21 Maret 2014   | Kel. Dulomo Selatan<br>Kec. Kota Utara Kota Gorontalo    | S. Pinjam      | Sehat |
| 6.  | KPRI WIRA USAHA BARU                            | 21/BH/XXII/III/2011  | Desa Toto Selatan  | S. Pinjam      | Sehat |

| N<br>O | NAMA KOPERASI   | NO DAN TGL BADAN HUKUM KOPERASI  | ALAMAT KOPERASI   | JENIS KOPERASI | KET.           |
|--------|---|--|---|----------------|----------------|
|        |   | 18 Maret 2011  | Kec. Kabila Kab.<br>Bone Bolango                                    |                |                |
| 7.     | KOPERASI KONSUMEN PRIMER<br>KARTIKA OTANAHA                       | 1449/BH/V, Tgl. 8 Juni 1971<br>PAD No. AHU-000142.AH.01.27 TAHUN 2021<br>Tgl. 19 Oktober 2021    | Jl. Jend. Sutoyo 25,<br>Kec. Kota Sel. Kota<br>Gorontalo            | Konsumen       | Sehat          |
| 8.     | KOPERASI KONSUMEN SYARIAH<br>EL MADANI BAPPEDA PROV.<br>GORONTALO | AHU-0009265.AH.01.26 TAHUN 2021<br>23 Maret 2021   | Jl. By Pass Kel.<br>Tamalate<br>Kec. Kota Timur Kota<br>Gorontalo   | Pemasaran      | Sehat          |
| 9.     | KOPERASI JASA TRANSPORTASI<br>ANGKASA GORONTALO                   | 005994/BH/M.KUMKM.2/X/2017<br>31 Oktober 2017  | Desa Tolotio<br>Kab. Gorontalo                                      | Jasa           | Cukup<br>Sehat |
| 10.    | KOPERASI PRODUSEN HUYULA<br>MOMONGU LIPU                          | AHU-0004076.AH.01.29.TAHUN 2022<br>04 Agustus 2022   | Kel. Kayubulan<br>Kab. Gorontalo                                    | S. Pinjam      | Cukup<br>Sehat |
| 11.    | KOPERASI KONSUMEN TUNAS<br>KARYA MUDA                             | AHU-0014845.AH.01.26.2022<br>18 Januari 2022   | Jl. Martin Liputo No.<br>500<br>Desa Bulalo Kab.<br>Gorontalo Utara | Konsumen       | Cukup<br>Sehat |
| 12.    | KOPERASI KONSUMEN<br>PERMATA SEJAHTERA<br>HULONTHALAGI            | AHU-0016261.AH.01.26 TAHUN 2022<br>13 Maret 2022   | Jl. Kempas Desa<br>Poowo<br>Kab. Bone Bolango                       | Konsumen       | Cukup<br>Sehat |
| 13.    | KOP. KONS. KARYAWAN TIRTA<br>BONE PDAM KOTA<br>GORONTALO          | 250/BH/V, Tgl. 23 Januari 2012<br>PAD No. AHU-0002276.AH.01.27.TAHUN<br>2021<br>Tgl. 11 Mei 2021 | Jl. Achmad<br>Nadjamudin<br>Kota Gorontalo                          | Konsumen       | Cukup<br>Sehat |
| 14.    | KOPERASI JASA ANGKUTAN<br>KRAWANG JAYA BERSAMA                    | 012522/BH/M.KUKM.2/II/2019<br>28 Pebruari 2019   | Kel. Huangobotu<br>Kec. Duingingi<br>Kota Gorontalo                 | Jasa           | Cukup<br>Sehat |
| 15.    | KOPERASI JASA ANGKUTAN<br>MITRA USAHA GORONTALO                   | AHU-0002525.AH.01.29 TAHUN 2022<br>06 Juni 2022  | Jl. Dunian No. 57<br>Kota Gorontalo                                 | Jasa           | Cukup<br>Sehat |
| 16.    | KOPERASI JASA SEGALA SAGELA<br>SEJAHTERA                          | AHU-0009974.AH.01.26.TAHUN 2021<br>26/04/2021  | Jl. Adam Zakaria<br>Kota Gorontalo                                  | Jasa           | Cukup<br>Sehat |
| 17.    | KSP DHANA PANEN RAYA  | AHU-0015444.AH.01.26.TAHUN 2022<br>9 Pebruari 2022   | Jl. Nani Wartabone<br>No. 27<br>Kota Gorontalo                      | S. Pinjam      | Cukup<br>Sehat |
| 18.    | KOPERASI PEMASARAN<br>PUSKOWAPI MOMONGU LIPU<br>PROV. GORONTALO   | AHU-001597.AH.01.26 TAHUN 2022<br>31 Januari 2022  | Jl. Taman Surya I<br>Kota Gorontalo                                 | Pemasaran      | Cukup<br>Sehat |
| 19.    | KSP SURYA UMG   | 27/BH/XXII/V/2013<br>30 Mei 2013   | Desa Pentadio Timur<br>Kab. Gorontalo                               | S. Pinjam      | Cukup<br>Sehat |
| 20.    | KOPERASI KONSUMEN BATARA<br>BTN GORONTALO                         | 450/BH/V/07<br>20 April 2007   | Jl. Nani Wartabone<br>Kota Gorontalo                                | Konsumen       | Cukup<br>Sehat |
| 21.    | KOPERASI KONSUMEN CAHAYA<br>MITRA SEJAHTERA                       | AHU-0005342.AH.01.29 TAHUN 2022<br>7 Oktober 2022  | Jl. Aloe Saboe<br>Kota Gorontalo                                    | Konsumen       | Cukup<br>Sehat |
| 22.    | KOPERASI JASA SIFAHYU JAYA<br>MANDIRI                             | AHU-0016879.AH.01.26.2021<br>29 Maret 2021   | Jl. Sirsak Kel.<br>Tomulabutoo<br>Kota Gorontalo                    | Jasa           | Cukup<br>Sehat |

## 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

*Outcome* program ini adalah Jumlah koperasi Jumlah Koperasi Aktif (15 Unit usaha). Pagu awal sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha berjumlah Rp. 351.394.900,- kemudian terdapat revisi pada belanja hadiah yang bersifat perlombaan penilaian produktifitas koperasi sebesar Rp. 150.000.000,-. Pada APBD-P mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 310.560.000,- sehingga total anggaran setelah perubahan sejumlah Rp. 511.954.900,- dengan realisasi hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp. 511.775.050,-. Silva kegiatan berjumlah Rp. 179.850,- yaitu item belanja yang yang tidak dapat dibelanjakan lagi yaitu antara lain sisa belanja ATK, bahan cetak, bahan komputer, alat listrk, makan minum rapat, makan minum aktivitas lapangan serta perjalanan dinas biasa.

*Pelaksanaan Program/ kegiatan ini adalah :*

### a. Temu Mitra Pemberdayaan Koperasi

Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo, Kabupaten/Kotadan Pihak Pembiayaan dalam hal Penguatan Kelembagaan dan permodalan Koperasi.
- Mencari Solusi Permasalahan terhadap Koperasi yang belum dapat mengakses program KUR dan Program UMI.

Sasaran Pelaksanaan kegiatan

- Terciptanya persamaan persepsi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo, Kabupaten/Kotadan Pihak Perbankan dalam hal Akses Pembiayaan Koperasi dan UMKM.
- Diperolehnya Solusi permasalahan terhadap Koperasi yang belum dapat mengakses Program KUR dan Program UMI

Kegiatan Temu Mitra diikuti peserta sejumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari Gerakan Koperasi dan Dinas Kota serta Dinas Provinsi yang membidangi

- Koperasi dan UKM dengan Nara sumber pada Kegiatan Temu Mitra pemberdayaan Koperasi yaitu Kepala Dinas kabupaten/Kota, Pimpinan Bank Sulutgo Cabang Gorontalo dan Deputi PT Pegadaian di Gorontalo
- b. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi pada APBD-P mendapat tambahan anggaran sejumlah Rp. 310.560.000,- yaitu belanja jasa tenaga pelayanan umum (1 orang x 22 hari x 4 bulan) Rp. 10.560.000,- dan belanja hibah uang kepada koperasi (koperasi konsumen Dekranasda Provinsi Gorontalo) Rp. 300.000.000,-
  - c. Pemberian Penghargaan atau hadiah kepada Koperasi Sehat Kepatuhan, sebesar Rp.150.000.000,- telah direvisi ke belanja barang untuk dijual /diserahkan kepada masyarakat (stimulan bantuan bagi UMKM) program pemberdayaan usaha mikro, usaha menengah, usaha kecil melalui Persetujuan DPR No. 160/DPRD/1212/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dengan pertimbangan revisi pemberdayaan terhadap UMKM berupa penguatan terhadap permodalan melalui belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan UMKM.
  - d. Jumlah pelaku usaha yang mengakses permodalan (KUR & UMI) berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan RI sebanyak 26.961. dengan nilai kredit sebesar Rp. 767.870.039.086,- dan Outstanding sebesar Rp. 506.927.919.360,-. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kinerja ini antara lain dilakukan melalui kegiatan temu mitra dengan sumber dana APBD.

### **3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**

*Outcome* dari program ini adalah Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya (target 390 orang) capaian 400 orang.

Keluaran Sub Kegiatan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (390 orang). capaian 400 orang.

Dukungan anggaran tahun 2023 untuk pelaksanaan program kegiatan ini berjumlah Rp. 1.494.733.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 1.476.095.636,- atau 98,75% realisasi keuangan dan 100% realisasi fisik. Pada program ini terdapat 2 (dua) sumber dana yaitu APBD dan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp. 1.215.052.000,- dengan realisasi DAK Non Fisik pada program ini sebesar Rp. 1.196.651.000 (98,49%). Sisa anggaran Rp. 18.401.000,-

Pelaksanaan Program :

**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

**Sub Kegiatan** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

*Output kegiatan ini adalah :*

- a. Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perkoperasian di laksanakan di 20 Koperasi yang tersebar di Kab/Kota se Provinsi Gorontalo. Tujuan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perkoperasian
  - Memberikan Edukasi kepada koperasi yang telah memperoleh hadiah di tahun 2022 sebagai bahan evaluasi terkait pemanfaatan dana untuk pengembangan usaha koperasi
  - Melakukan sosialisasi kepada Koperasi calon penerima bantuan tahun 2023 dan tahun 2024 terkait program yang ada di dinas dan pemanfaatannya di prioritaskan untuk pengembangan usaha koperasi
  - Melakukan pembinaan kepada Koperasi yang belum melaksanakan RAT, terkait kendala yang menyebabkan koperasi belum melaksanakan RAT, mencari solusi dengan memberikan edukasi dari aspek kelembagaan, usaha dan Permodalan Koperasi.
- b. Rapat Pembinaan bidang Koperasi dan Tenaga Pendamping Koperasi tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 12 kali yang di laksanakan di Provinsi Gorontalo sebanyak 12 kali. Kegiatan ini sebagai media koordinasi dan konsolidasi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo dengan tenaga Pendamping KUKM dalam rangka mencari solusi permasalahan terhadap pemberdayaan koperasi
- c. FGD Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan penataan kelembagaan koperasi yang dilaksanakan 1 (satu) kali di Provinsi Gorontalo. Narasumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi & UKM RI serta Pimpinan Kantor Pajak Pratama Provinsi Gorontalo dengan jumlah 70 peserta dari gerakan koperasi (anggota, pengurus dan pengawas koperasi), aparat Dinas koperasi kabupaten/kota serta pendamping koperasi.

- **Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK).**

Total Jumlah Pagu DAK 2023 untuk DAK Non Fisik sebesar Rp. 2.021.583.000,-

***Peningkatan kapasitas SDM Koperasi***

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi tahun 2023, dilaksanakan 8 angkatan dengan jumlah peserta 200 orang yang berasal dari koperasi binaan Kab/Kota dan Provinsi. Untuk koperasi binaan Provinsi berjumlah 30 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari Pengurus Pengawas dan anggota Koperasi dalam mengelola koperasi agar lebih kuat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sehingga koperasi dapat mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan jumlah pagu Anggaran Rp. 1.215.052.000,- penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2023 berjumlah Rp. 1.196.651.000,- dengan persentase keuangan 98,49 % dan persentase fisik 100 %, dengan silva berjumlah Rp.18.401.000,- (Honorarium pendamping koperasi, transport pendamping) Pencairan dana sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tahapan yaitu Pencairan Tahap I berjumlah **Rp. 545.326.000,-** dan Tahap II berjumlah **Rp. 669.726.000,-** Tahap I terdiri atas 4 angkatan dan tahap II terdiri atas 4 angkatan.

Tahap I :

Pelaksanaan Tanggal 04 s.d 07 Mei 2023

1. Pelatihan Akuntansi Koperasi : 25 peserta
2. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 07 s.d 10 Mei 2023

3. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT : 25 peserta
4. Pelatihan Akuntansi Koperasi Berbasis IT : 25 peserta

Tahap II :

Pelaksanaan Tanggal 08 s.d 11 November 2023

1. Pelatihan Akuntansi Koperasi II : 25 peserta
2. Pelatihan Pengawasan Koperasi : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 11 s.d 14 November 2023

3. Pelatihan Koperasi Berbasis Bisnis : 25 peserta
4. Pelatihan Kompetensi Koperasi Berbasis SKKNI : 25 peserta

(Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia)

#### **4. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Outcome program adalah jumlah UKM yang berdaya saing (100 unit usaha dengan capaian kinerja 50 UKM). adapun capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,96% dari target 100%.

Pagu anggaran 2023 setelah perubahan pada program ini berjumlah Rp. 1.858.867.200,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2023 berjumlah Rp. 1.847.359.972,- dan silva sebesar Rp. 11.507.228,-.

Pada program/kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Kalangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan. Pagu anggaran induk pada sub kegiatan ini sejumlah Rp. 530.576.200,- kemudian terdapat penambahan anggaran melalui revisi anggaran sebesar Rp. 321.900.000,- (antara lain stimulan bantuan bagi UMKM) dan tambahan anggaran melalui APBD-P sejumlah Rp. 52.800.000,- (belanja jasa tenaga pelayanan umum 5 orgx 22 harix 4 bulan), sehingga total anggaran sub kegiatan ini setelah perubahan sejumlah Rp. 905.276.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 903.693.285,- dan silva Rp. 1.582.915 yaitu sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan.

Pada sub kegiatan ini juga terdapat anggaran yang ditagging melalui sumber dana DID Kinerja Sisa IF Ta. 2022 & Sebelum Akumulatif) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 456.000.000,- (stimulan pengembangan produk bagi UMKM) tanpa menambah pagu induk. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 serta mengacu pada rencana penggunaan sisa IF TA. 2022 & Sebelum (Akumulatif) Provinsi Gorontalo

*Output Kegiatan ini adalah :*

- a. Bedah Produk bagi UMKM sebanyak 25 UKM/pelaku usaha se Provinsi Gorontalo. Tujuan bedah Produk terkait kesesuaian perizinan dengan produk, kapasitas produksi, kemasan serta pemasaran. (*daftar peserta terlampir*)
- b. Mentoring UMKM berbasis Syariah sebanyak 25 UKM/pelaku usaha se Provinsi Gorontalo pada 11 LKSA/Pontren/madrasah di Provinsi Gorontalo. Tujuannya untuk melaksanakan monitoring kepada para pelaku UMKM yang berbasis syariah terhadap pengembangan usaha yang telah di fasilitasi bantuan maupun pelatihan. (*terlampir*)
- c. Stimulan Pengembangan produk bagi UMKM sebanyak 65 UKM di Provinsi Gorontalo yaitu bantuan bahan produksi bagi UKM olahan kue di Kota Gorontalo (35 UKM), Kabupaten Bone Bolango 21 UKM dan Kabupaten Gorontalo 9 UKM. Untuk usaha olahan kue masing-masing UKM menerima bahan produksi yaitu :
  - Tepung terigu 10 kg
  - Mentega Kaleng 7 Kg
  - Susu Kaleng 10 Kaleng
  - Susu Full cream 3 Dus
  - Minyak Goreng 10 Liter
  - Gula Pasir 10 Kg
  - Tepung Beras 11 Kg
- d. Stimulan Pengembangan produk bagi UMKM sebanyak 163 UKM di Provinsi Gorontalo yang diperuntukkan bagi bahan produksi bagi UKM olahan kue, kios dan warung makan

**b. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan**

**Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK Non Fisik KUKM).**

***Peningkatan kapasitas SDM UMKM***

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UKM tahun 2023 dilaksanakan 5 angkatan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM UMKM dengan jumlah peserta 125 orang yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo dan

Kabupaten Pohuwato dan Sosialisasi layanan bantuan hukum bagi UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk dalam rangka peningkatan SDM bagi pelaku usaha serta pemahaman terhadap hukum bagi 290 UKM/IKM/Pelaku se Provinsi Gorontalo.

Jumlah pagu Anggaran untuk DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas SDM UKM Rp. 806.531.000,- penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2023 berjumlah Rp. 800.121.065,- dengan persentase keuangan 99,20 % dan persentase fisik 100 %, dengan silva berjumlah Rp. 6.409.935,- (Honorarium Narasumber). Pencairan dana sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tahapan yaitu Pencairan Tahap I berjumlah **Rp. 428.132.495,-** dan Tahap II berjumlah **Rp. 341.065.500,-**  
Tahap I : terdiri atas 3 angkatan Diklat dan 2 angkatan sosialisasi  
Tahap II terdiri atas 2 Diklat dan 2 Sosialisasi LBH

Tahap I :

Pelaksanaan Tanggal 09 s.d 12 Mei 2023

1. Diklat Akuntansi Laporan Keuangan Tahun 2023 : 25 peserta  
(Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Bone Bolango, & Kabupaten Gorontalo))
2. Diklat Kewirausahaan Bagi UMKM Tahun 2023 : 25 peserta  
(Kabupateen Bone Bolango, Goorntalo Utara, Boalemo, Pohuwato)
3. Diklat Produksi Olahan Pangan yang baik & Packaging : 25 Peserta  
bagi UMKM
4. Sosialisasi Layanan Hukum bagi UMKM Tahun 2023 : 65 peserta  
(2 angkatan)

Tahap II :

Pelaksanaan 9 s/d 12 November 2023

1. Diklat Sertifikat Jaminan Halal : 25 Peserta
2. Diklat Strategi dan teknik Pemasaran : 25 peserta
3. Sosialisasi Layanan Hukum bagi UMKM Tahun 2023 : 70 peserta  
(2 angkatan)

## 5. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, sub kegiatan Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Pagu awal untuk program ini berjumlah Rp. 5.619.020.900,- kemudian terdapat revisi pada beberapa belanja yang bersesuaian total sebesar Rp. 300.100.000,-. Di tahun 2023 program ini mendapat tambahan APBD-P sebesar Rp. 10.084.302.000,- yang diperuntukkan untuk Bantuan Bahan Produksi/Olahan Bagi UMKM, verifikasi penerima manfaat UKM/IKM serta tambahan honor untuk tenaga pelayanan umum sehingga total anggaran yang bersumber dari DAU 2023 pada program ini berjumlah Rp. 16.003.422.900,-,

Pada Program ini terdapat anggaran yang ditagging melalui sumber dana DID kinerja sisa IF TA. 2022 & sebelum akumulatif TA. 2023 sebesar Rp. 8.538.800.000,- (stimulan pengembangan produk bagi UMKM sejumlah Rp. 2.432.000.000,- dan bantuan bahan produksi/olahan bagi UMKM sejumlah Rp. 6.106.800.000,- melalui APBD-P) serta DID kinerja tahun berjalan kesejahteraan masyarakat TA. 2023 senilai Rp. 2.841.600.000,- (Bantuan bahan produksi/olahan bagi UMKM melalui APBD-P). Outcome dari program adalah jumlah UKM yang bertransformasi usaha (target 30 unit usaha).

*Output kegiatan ini adalah :*

- a. Terlaksananya Pelatihan vocational 25 peserta (soft skill training, bimtek pengolahan produk) di Kota Gorontalo. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan /skill teknis SDM UMKM dalam mengelola usaha khususnya pada sektor prioritas
- b. Pelaksanaan Indonesia Fashion Week, dilaksanakan bulan Februari 2023 yang melibatkan 15 Designer Dari Gorontalo, Pameran Produk Unggulan Daerah, Talk Show, Fashion Show. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan promosi sulaman karawo Gorontalo pada Indonesian Fashion Week, meningkatkan daya saing perancang lokal menghadapi era perdagangan bebas.  
Adapun produk unggulan yang dipamerkan pada kegiatan Indonesian Fashion Week yaitu Kerajinan karawo, produk pangan .
- c. Gebyar UMKM, diikuti oleh 50 UKM dari Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di City Mall. Yaitu pameran produk unggulan Gorontalo selama 3 hari pelaksanaan yang dirangkaikan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
- d. Harvesting Puncak rangkaian Gernas BBI dan BBWI Tahun 2023, bertujuan untuk mendorong penggunaan produk lokal agar bisa menguasai pasar domestik

dan internasional. Pelaksanaan kegiatan di GPC Kota Gorontalo. Kegiatan ini diikuti oleh UKM/IKM se-Provinsi Gorontalo.

Stimulan pengembangan produk bagi UMKM (1.116 UMKM) . bantuan ini diperuntukan bagi UKM Olahan pangan, Kios, warung makan, aneka minuman Se Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada juknis yang berlaku.

***Sasaran Strategis III : Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)***

**6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

Outcome dari program ini adalah Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri. adapun target Renstra 36 Dokumen. Tercapai  
Pada program ini capaian fisik tidak mencapai realisasi 100% karena terdapat belanja yang tidak dimanfaatkan pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yaitu belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp. 1.500.000,-. Dimana anggaran ini dianggarkan untuk galeri Dekranasda yang berlokasi di City Mall, tetapi di tahun 2023 lokasi galery Dekransda telah berpindah ke lokasi yang baru.

*Pelaksanaan Program :*

**Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**

Pada program ini capaian fisik tidak mencapai realisasi 100% karena terdapat belanja yang tidak dimanfaatkan pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (12 Dok), tercapai

Dalam melaksanakan kegiatannya di tahun 2023 didukung oleh anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.309.501.900,- Dimana penganggaran induk APBD 2023 untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 882.863.900,-. Kemudian terdapat revisi antar belanja pada sub kegiatan ini dan tambahan anggaran melalui APBD-P sebesar Rp. 426.638.000,- yang diperuntukkan untuk kekurangan pembayaran Honorarium PTT (2 orang x 4 bulan) dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada

Masyarakat (Bantuan Bahan dan Peralatan bagi IKM) serta perjalanan dinas Identifikasi verifikasi fasilitasi bantuan IKM untuk tahun 2023.

*Output kegiatan ini :*

- a. Pelatihan Pengembangan WUB di laksanakan di Kota Gorontalo yang diikuti oleh 20 IKM/pelaku usaha produk pangan pada bulan Mei Tahun 2023

*Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

- Mendorong terciptanya Wira Usaha Baru yang mandiri dan professional yang mampu menciptakan lapangan kerja.
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas produk.
  - Memberikan Pembekalan kepada calon penerima stimulan agar dapat mengelola stimulan berupa bantuan sarana dan prasarana usaha untuk lebih produktif
- b. Fasilitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, listrik bagi IKM Pangan (*terlampir*)  
Tujuan :
    - Mendorong terciptanya Wira Usaha Baru yang mandiri dan professional yang mampu menciptakan lapangan kerja.
    - Peningkatan kualitas dan kuantitas produk.
    - Meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.
    - Memanfaatkan peluang pasar lokal, regional dan nasional
  - c. Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan di Kab.Boalemo yang diikuti 20 IKM/Pelaku Usaha dapat mengurus sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dimana sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi pada pengurusan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
  - d. Fasilitasi Kemasan untuk 20 IKM Pangan kabupaten/kota dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2023. Fasilitasi ini diberikan untuk memberikan nilai tambah serta faktor pembeda dari produk kompetitor sejenis dalam menghadapi persaingan perdagangan global, mendorong daya saing produk IKM dan meningkatkan penjualan. (*Terlampir*)
  - e. Fasilitasi Sertifikat Halal bagi 20 IKM Pangan dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun 2023. (*Terlampir*)

*Tujuan Pelaksanaan kegiatan :*

- Memberikan ketenangan bagi konsumen.

- Untuk menjangkau calon pembeli agar membeli produknya
- Memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan
- Lebih unggul dari kompetitor yang belum memiliki sertifikat halal.
- Untuk meningkatkan keuntungan atau laba.

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (target 12 Dokumen dan capaian 12 Dokumen). Pagu awal pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 1.186.499.300,- ditahun 2023 pada sub kegiatan ini terdapat revisi sebesar Rp 77.500.000,- dan tambahan anggaran melalui DID sebesar Rp. 127.925.000,- dan tambahan anggaran melalui APBD-P sebesar Rp. 346.240.000,- yaitu belanja barang yang diserahkan bagi IKM ILMEA, belanja Jasa tenaga pelayanan umum, dan Hibah uang pada Dekranasda Provinsi Gorontalo. Sehingga pagu anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 1.738.164.300,- Anggaran ini untuk melaksanakan beberapa kegiatan seperti pada uraian dibawah ini.

*Output kegiatan ini adalah :*

1. Pelatihan pengembangan Wirausaha Baru bagi 30 UKM/IKM/Pelaku usaha Industri Kerajinan, Sandang, Aneka dan Kerajinan ; Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut

Tujuan :

- Mengembangkan minat dan motivasi untuk terjun ke dunia wirausaha;
- Memberikan Pembekalan kepada calon penerima stimulan agar dapat mengelola stimulan berupa bantuan sarana dan prasarana usaha untuk lebih produktif
- peningkatan kualitas dan kuantitas produk

Outcome :

Untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin pelaku/kelompok usaha industri kecil dan menengah yang mandiri dan profesional sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru, bagi lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan potensi SDA dan SDM yang tersedia serta meningkatkan pendapatan dan ekonomi

masyarakat, dan bisa memanfaatkan peluang pasar lokal, regional, nasional dan ekspor produk

2. Bantuan Bahan dan Peralatan IKM Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan bagi 6 UKM/IKM/Pelaku usaha Industri Kerajinan, Sandang, Aneka dan Kerajinan anggaran Rp. 285.000.000,- melalui APBD induk

*Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

Menstimulir pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menyerap tenaga dan menekan angka pengangguran kerja serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

3. Bantuan Bahan dan Peralatan IKM Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut bagi 8 UKM/IKM/Pelaku usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut. Total anggaran Rp. 495.000.000,- melalui APBD-P.
4. Bantuan Kemasan bagi IKM Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan bagi 4 (empat) UKM/IKM/Pelaku usaha Industri Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan

*Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

Menstimulir pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menyerap tenaga dan menekan angka pengangguran kerja serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Pemeliharaan Hak Paten Karawo kepada pelaku industri kerajinan Karawo Gorontalo

*Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

Melindungi Paten dan mempertahankan Kekayaan Intelektual Sulaman Karawo

6. Pembinaan dan Pendampingan IKM IKSAAK kepada pelaku industri kerajinan di Kabupaten/Kota

*Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap IKM IKSAAK di Kabupaten/Kota

7. Verifikasi dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan WUB kepada calon penerima bantuan IKM IKSAAK dan ILMEA di kabupaten/Kota

*Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

- Untuk memastikan kelompok usaha yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan modal usaha telah memenuhi persyaratan.
- Pengembangan industri kerajinan daerah yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing,

#### 8. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan/ Pengendalian IKM

##### *Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

- melakukan penyesuaian program atau kegiatan, target dan lokasi, dan melakukan konfirmasi terhadap target/lokasi, dan anggaran.
- Mengevaluasi pemanfaatan program – program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya,
- Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul serta memberikan solusi upaya pemecahannya, dan
- Memberikan masukan, saran dan rekomendasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan program/kegiatan yang akan datang

#### 9. Pameran dan Rakernas Dekranas

##### *Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

- Mengikuti Pameran Produk Kerajinan Nusantara “Kriya Nusa 2023” dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) DEKRANAS Tahun 2023.
- Tujuan Pameran Kriyanusa 2023 yaitu untuk memfasilitasi perajin dalam mempromosikan dan memasarkan hasil kerajinannya serta meningkatkan rasa cinta dan bangga masyarakat Indonesia akan produk kerajinan Indonesia, selain itu sebagai ajang pembelajaran bagi para perajin untuk memperhatikan produk-produk yang dipamerkan.
- Tujuan Rakernas DEKRANAS yaitu untuk menambah wawasan bagi DEKRANAS dan DEKRANASDA Provinsi/Kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kepada IKM Kerajinan sehingga produk kerajinan yang dihasilkan para perajin lebih berkualitas, memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar nasional maupun Internasional.

#### 10. Keikutsertaan pada Forum OPD

##### *Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

Menyesuaikan Program dan Kegiatan tahun 2023 bersama Kabupaten / Kota dan instansi terkait.

*Sasaran Pelaksanaan kegiatan* yaitu OPD Dinas Kumperindag Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

11. Kegiatan Rapat Dekranasda Provinsi Gorontalo

*Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

Menyampaikan pendapat, informasi dan merencanakan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, memenuhi target pelaksanaan program. selain itu adanya rapat rutin ini menjadi upaya untuk menjamin pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai rencana dan target realisasi.

12. Hibah kepada Dekranasda Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 200.000.000,-

13. Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo bagi pelaku industri kerajinan

*Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

Meningkatkan kemampuan SDM IKM yang berdaya saing

➤ **Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri**

*Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah* Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (12 Dokumen)

Pagu awal anggaran sub kegiatan ini berjumlah Rp. 266.400.585,- kemudian terdapat revisi sebesar Rp.87.500.000,- dan pada APBD-P mendapat tambahan anggaran sejumlah Rp. 30.800.000,- Total akhir pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 209.700.585,- dengan realisasi sebesar Rp. 201.231.240,-

*Output kegiatan ini adalah :*

a. Fasilitasi penyusunan RPIK Kabupaten/Kota

*Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

- Mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
- Menentukan sasaran strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten
- Mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

**7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**

Outcome Program Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri (12 Dokumen)

**Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**

**Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**

Indikator Kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebanyak 12 Dokumen

Pagu sub kegiatan sejumlah Rp. 150.108.075,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 146.523.720,- dan realisasi keuangan sebesar 97,61% dan realisasi fisik 100%.

Indikator Output sub kegiatan ini adalah data informasi IKM.

*Output kegiatan ini adalah:*

- a. Sosialisasi Aplikasi/Web sistem informasi Industri (SIINAS) yang dilaksanakan di Kota Gorontalo. Peserta adalah Aparat pembina dari dinas Perindustrian dan operator Kabupaten/Kota.

*Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

- Untuk menghasilkan kebijakan industri yang tepat,
  - Memberikan Pemerintah data yang akurat, lengkap, dan up-to-date.
  - Tersebarnya Data industri di berbagai instansi
  - Terdapatnya Permasalahan dalam penyampaian data
- b. Penganggaran untuk honorarium 4 (empat) orang penyusun data IKM di kab/kota yang dibayarkan setiap triwulan. Dimana tugas dari pengumpul data ini yaitu mengumpul

## **8. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**

Outcome Program Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri (12 Dokumen)

**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**

**Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**

### **yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

Indikator Kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sebanyak 1 dokumen

Pagu awal anggaran sub kegiatan ini berjumlah Rp. 119.354.545,- kemudian terdapat revisi sebesar Rp. 26.400.000,- Total akhir pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 92.954.54585,- dengan realisasi sebesar Rp. 92.427.250,-

*Output kegiatan ini adalah:*

Fasilitasi pendampingan, konsultasi Perizinan khusus sektor Industri untuk Memberikan kemudahan untuk para IKM dan industri menengah dalam mendapatkan informasi serta pengurusan perizinan khususnya sektor Perindustrian.

*Tujuan Pelaksanaan kegiatan*

1. Menciptakan iklim usaha yang tertib karena status legalitas perusahaan sudah lengkap.
2. Memudahkan pemerintah membina usaha industri

## **9. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

Outcome dari program ini adalah Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi dengan target 2 dokumen dan capaian 8 dokumen dari 8 perusahaan yaitu PT. Biomas Jaya Abadi, PT. Pabrik Gula , PT. Multi Nabati Sulawesi, CV. Camar Laut, PT. Seger Agro Nusantara, PT. Dwi Karya Makmur, PT. Sinar pangan Abadi, PT. Milenium Agro Selebes.

Untuk pelaksanaan program ini didukung oleh anggaran total sampai Desember 2023 sejumlah Rp. 100.851.820,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2023 berjumlah Rp. 96.180.367,- (99,01% keuangan dan 95,37% fisik).

Realisasi Fisik ini tidak mencapai 100% karena adanya item belanja cetak senilai Rp. 1.001.500,- yang tidak dibelanjakan. Dan realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena adanya sisa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

*Pelaksanaan Program :*

**Kegiatan** Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

**Sub Kegiatan** Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

Indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal dengan target 8 dokumen, capaian 65 dokumen yaitu dokumen Surat Keterangan Asal.

*Output kegiatan ini adalah :*

a. Pengawasan dan monitoring Penerbitan Surat Keterangan Asal

Tujuan Pelaksanaan kegiatan yaitu pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor impor dan antar pulau di kabupaten/kota.

Sasaran Pelaksanaan kegiatan ini adalah Pelaku Usaha, Eksportir, Perusahaan termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM/IKM) dan Instansi Terkait.

b. Fasilitas Diklat bagi aparatur dalam rangka peningkatan SDM

Tujuan Pelaksanaan kegiatan yaitu untuk meningkatkan kemampuan aparatur kesusunya di bidang ekspor sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi organisasi dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh 3 (tiga) orang aparatur yaitu Diklat Prosedur ekspor yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Sumber daya manusia ekspor dan jasa perdagangan kementerian perdagangan RI di Jakarta

***Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)***

## **10. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**

Outcome dari program ini adalah Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan target 28 Laporan, Capaian 28 Laporan yaitu Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan ( 16 laporan) dan

Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya (12 laporan)

Pelaksanaan Program :

**Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**

✚ **Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Pelaksanaan sub kegiatan :**

✚ **Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Anggaran induk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 607.476.772,- ditahun 2023 sub kegiatan ini mendapat tambahan anggaran melalui APBD-P sejumlah Rp. 1.029.000.000,- dan melalui DID dengan rincian :

- a. Penambahan anggaran melalui pergeseran antar OPD Tahun Anggaran 2023 :
  - ~ Sisa IF Tahun 2022 = Rp. 505.100.000,-
  - ~ Pergeseran I antar OPD = Rp. 750.000.000,-
  - ~ Pergeseran II antar OPD = Rp. 410.810.000,-
  - ~ Pergeseran III antar OPD = Rp. 772.755.000,-
- b. DID Kinerja Tahun Berjalan Inflasi 1 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.963.421.000,- yang terdiri atas belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat Rp. 3.780.000.000,- dan operasional pasar murah Rp. 183.421.000
- c. DID IF Tahun Berjalan Inflasi 3 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.055.630.500,-

Sehingga pagu anggaran sub kegiatan hingga 31 Desember 2023 sejumlah Rp. 13.094.193.272,- dengan realisasi Rp. 9.807.388,752,- silva sebesar Rp. 3.286.804.520,- yang sebagian merupakan sisa dari dari DID IF tahun Berjalan Inflasi 3 Tahun anggaran 2023 karena rentang waktu pertanggungjawaban kegiatan yang terbatas pada tahun anggaran.

adapun realisasi fisik 86,94% dan keuangan 74,90%. Ketidackapaian atas kinerja ini karena adanya sisa dari dari DID IF tahun Berjalan Inflasi 3 Tahun anggaran

2023 yang tidak dapat dibelanjakan karena karena rentang waktu pertanggungjawaban kegiatan yang terbatas pada tahun anggaran.

Output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 4 laporan dan capaian 73 laporan pelaksanaan pasar barang kebutuhan pokok bersubsidi.

*Output kegiatan ini adalah :*

- a. Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi tahun 2023 yang dilaksanakan 73 kali di kabupaten kota se Provinsi Gorontalo, dengan jumlah penerima 83.266 penerima.  
Pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah dilakukan melalui Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi. Kegiatan ini dilakukan menjelang hari besar keagamaan (HBKN), saat adanya potensi kenaikan harga komoditi barang kebutuhan pokok dan kegiatan yang terkait pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan bencana. Dengan menyediakan secara keseluruhan atau sebagian diantaranya yaitu komoditi antara lain beras, minyak goreng dalam kemasan dan minyak goreng olahan (minyak kampung), gula Kristal putih bukan rafinasi, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, ikan tuna dan atau barang kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
- b. Pemantauan Harga Barang Pokok di Pasar Rakyat di Kabupaten/Kota setiap hari kerja, dilakukan dalam rangka mengidentifikasi ketersediaan barang pokok, sekaligus mengumpulkan informasi harga barang pokok yang berlaku saat itu di Pasar Rakyat, apakah terjadi kenaikan harga ataukah terjadi penurunan harga, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan, ataupun dasar pelaksanaan Operasi Pasar/Kebutuhan Pokok Bersubsidi.
- c. Honorarium pengolah data harga dan informasi harga barang pokok dan barang penting.

### **Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**

#### **✚ Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi**

Anggaran untuk mendukung kegiatan ini hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp. 127.253.510,- dari pagu induk sejumlah Rp. 138.811.000, kemudian direvisi sebesar Rp. 11.557.500,-. Adapun realisasi sebesar Rp. 126.827.170,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,66%.

*Output Kegiatan :*

- a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dilaksanakan di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo

Kegiatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan pasokan dan ketersediaan pupuk bersubsidi di semua lini tersalurkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. Pengawasan dimulai dari gudang penyimpanan produsen, distributor, hingga pengecer. Semua pelaku usaha pupuk bersubsidi yang ditunjuk dan ditetapkan wajib melaksanakan penyaluran, penjualan, dan penyimpanan, sesuai dengan ketentuan regulasi, dan diharapkan memahami dari kewajiban serta larangan yang tertuang dalam regulasi.

Untuk sasaran kegiatan pengawasan tahun anggaran 2023, lebih memprioritaskan kepada kios pengecer pupuk bersubsidi, yang diharapkan semua kios pengecer bisa menyalurkan pupuk subsidi tersebut tepat kepada petani atau kelompok/tani yang terdaftar dalam E-RDKK atau E-Alokasi Pelaksanaan Rapat koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida dilaksanakan sebanyak 1 kali di Provinsi Gorontalo

## 11. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

**Outcome** dari program adalah Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor dengan target 6 Komoditi, dan capaian 7 Komoditi yaitu molases, ikan tuna, kopra, jagung, santan beku, minyak mentah dan pelet.

**Kegiatan** Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

**Sub Kegiatan** Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

Anggaran induk program/kegiatan ini yaitu Rp. 251.801.947,-. Ditahun 2023 melakukan revisi pada beberapa sub kegiatan sebesar Rp. 17.006.648,- sehingga

anggaran yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan hingga tahun 2023 ini berjumlah Rp. 234.795.299,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 212.371.682,- (90,45% keuangan, dan 95,55% fisik). Realisasi capaian tidak memenuhi target 100% fisik karena terdapat item belanja honorarium narasumber dan belanja perjalanan dinas luar negeri yang tidak terealisasi. dan realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena terdapat sisa-sisa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Output program/kegiatan ini adalah sebagai berikut :

d. Pelaksanaan Misi Dagang

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Misi Dagang untuk memperkuat potensi perdagangan kerja sama di berbagai sektor, dan membangun partnership dan jejaring bisnis dengan menghadirkan pelaku usaha dan berbagai stakeholder antar kedua provinsi, membangun kesepahaman dan tindak lanjut kerja sama di bidang perdagangan sapi serta adanya permasalahan tentang Pengiriman Sapi dari Provinsi Gorontalo ke Tarakan karena adanya persyaratan dari Balai karantina Pertanian yang mempersyaratkan karantina mandiri 14 hari.

Kegiatan Misi Dagang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023 dan dilaksanakan di Tarakan Kalimantan Utara. dengan melibatkan 3 (tiga) pelaku usaha pedagang sapi dari Provinsi Gorontalo.

e. Pelaksanaan Pameran Dagang

Kegiatan Pameran ini sebagai ajang promosi yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempromosikan produk potensi ekspor dan produk ekspor. Produk potensi ekspor disini adalah bahan/barang hasil olahan usaha kecil menengah (UKM) dari daerah yang kualitasnya diminati dan mempunyai daya jual. Pameran kali ini mengikutsertakan 4 (empat) UKM/IKM pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke – 38 yang merupakan pameran tahunan berskala internasional oleh Kementerian Perdagangan. 4 (empat) UKM/IKM itu yaitu :

- PT. Mafahim Gorontalo Indonesia, Pemilik Zikran Mbuti. Produk teh daun Sirsak
- IKM Putro. Pemilik Vivi Suaib. Produk Keripik Pisang Susu
- Kaini Karawo, pemilik Otherandi Produk Kain Karawo
- UKM Depulalitata. Pemilik Rachmatia M. Aridi Produk Olahan Pangan

**Tabel. 3.12. REKAP REALISASI EXPORT BERDASARKAN KOMODITI SELANG BULAN DESEMBER 2023**

| NO            | JENIS KOMODITI | JUMLAH KOMODITI (KG) | NILAI EKSPOR (USD)   | NEGARA TUJUAN               | EKSPORTIR  |
|---------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 1             | MOLASES        | 24.000.320           | 4.020.053            | FILIPINA                    | PT. PABRIK GULA GORONTALO  |
| 2             | IKAN TUNA      | 5.774                | 55.528               | SINGAPURA, JEPANG, MALAYSIA | CV. CAMAR LAUT, CV. BARIS ANUGERAH                                     |
| 3             | KOPRA          | 15.100.000           | 2.315.000            | INDIA, CINA                 | PT. MULTI NABATI SULAWESI  |
| 4             | JAGUNG         | 56.400.000           | 17.830.405           | FILIPINA                    | PT. SEGER AGRO NUSANTARA, PT. DWI KARYA MAKMUR, PT. SINAR PANGAN ABADI |
| 5             | PELET          | 52.696.144           | 12.900.259           | KOREA SELATAN, JEPANG       | PT. BIOMAS JAYA ABADI  |
| 6             | SANTAN BEKU    | 852.240              | 787.816              | CINA                        | PT. MILENIUM AGRO SELEBES  |
| 7             | MINYAK MENTAH  | 61.800               | 50.144               | CINA                        | PT. MILENIUM AGRO SELEBES  |
| <b>JUMLAH</b> |                | <b>149.116.278</b>   | <b>37.959.205,00</b> |                             |  |

## 12. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

*Outcome* dari program adalah Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen target 5 Dokumen, Capaian 5 Dokumen.

### ❖ Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

#### Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan sub kegiatan ini didukung oleh anggaran awal sebesar Rp. 1.862.791.071,-. kemudian terdapat revisi sebesar Rp. 13.383.000,- dan tambahan anggaran melalui APBD-P yang diperuntukkan untuk penunjang kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara lain honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK sebesar Rp. 171.000.000,-. Sehingga total

pagu anggaran hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.020.408.071,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1972.053.820,- dan silva sebesar Rp. 48.354.251,- yang merupakan sisa pembayaran honorarium majelis sidang dan sekretariat yang tidak ditagih karena adanya 4 (empat) anggota yang mengundurkan diri yaitu di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo. Adapun realisasi Fisik mencapai 100% dan keuangan 97,61%.

*Output kegiatan ini adalah :*

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain sidang BPSK, honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK  
Penyelesaian Sengketa Konsumen dilaksanakan bila ada pengaduan konsumen dan apabila terindikasi akan merugikan konsumen misalnya ada promo penjualan, klausula baku yang akan merugikan konsumen, penjualan barang yang tidak sesuai ataupun merugikan konsumen dan lain-lain sesuai peraturan perlindungan Konsumen maka penyelesaian sengketa konsumenn di laksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan juga Oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sasaran Pelaksanaan kegiatan Untuk melindungi Konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK, yang dilaksanakan di Kota Gorontalo dengan peserta anggota dan sekretariat BPSK dari 6 Kabupaten/Kota Mengevaluasi kegiatan Bimbingan Teknis BPSK yang di Laksanakan anggota BPSK Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan MENPERINDAG No.350/MPP/Kep/12/2001, Peraturan Menteri Perdagangan RI No 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- c. Sosialisasi BPSK Oleh anggota BPSK di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo Sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPSK juga di laksanakan oleh anggota BPSK di setiap pelaksanaan pasar murah di kabupaten kota sesuai dengan lokasi pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo Pelaksanaan Sosialisasi Anggota BPSK dengan tujuan agar masyarakat mengetahui keberadaan BPSK serta mengetahui Tugas dan Fungsi BPSK sesuai yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen. Jumlah

Pengaduan Konsumen Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebanyak 320 Kasus pengaduan, dan yang diselesaikan 284 kasus antara lain tentang Pengaduan permasalahan pembiayaan, Pengaduan Klausula Baku, liter/timbangan, penjualan diatas harga Het, penjualan makanan/minuman ditoko-toko (diserahkan ke BPOM Kabupaten/Kota). kasus yang tidak terselesaikan bukan kewenangan BPSK Kabupaten/Kota.

- c. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kegiatan BPSK
- d. Pengaduan Konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai ketentuan yang berlaku:
  - BPSK Kabupaten Pohuwato ditahun 2023 jumlah kasus yang ditangani 26, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus klausula baku/pembiayaan
  - BPSK Kota Gorontalo, 53 kasus yang ditangani dan penyelesaian sengketa secara mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus klausula baku/pembiayaan
  - ~ BPSK Kabupaten Gorontalo ditahun 2023 jumlah kasus 49, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus klausula baku/pembiayaan
  - ~ BPSK Kabupaten Boalemo, ditahun 2023 jumlah kasus 49, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus klausula baku/pembiayaan
  - ~ BPSK Kabupaten Bone Bolango ditahun 2023 jumlah kasus 31 yang diterima,
  - ~ Kabupaten Gorontalo Utara, ditahun 2023 jumlah kasus 25 yang diterima, yang diselesaikan melalui mediasi. Jenis kasus klausula baku/pembiayaan.
  - ~ Provinsi Gorontalo, terdiri atas 10 kasus liter/timbangan (pasar tradisional/toko) dan 2 kasus penukaran kembalian uang dengan permen. 4 kasus pembelian yang harganya tidak bersesuaian antara harga. Penyelesaian kasus ini melalui pembinaan

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk**

Jumlah pagu anggaran hingga 31 Desember 2023 untuk pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu Rp. 122.042.000,- dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember

2023 sebesar Rp. 121.793.520,- atau 99,80 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik.

Indikator kinerja adalah Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau dengan target 3 komoditi dan capaian 4 (empat) Komoditi yaitu kopi, biji kakao, kelapa sawit dan lada putih. Sesuai Keputusan Menteri Perdagangan No. 164 Tahun 1996 tentang pengawasan mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Jumlah komoditi yang dipantau sebanyak 7 (tujuh) yaitu jagung, rumput laut, kakao, beras, kelapa sawit, kopra, dan kopi
- b. Pengawasan mutu barang/komoditi ber-SNI di kabupaten/kota
- c. Jejaring kerja program kegiatan dengan Kabupaten / Kota
- d. Partisipasi pada Temu Pelanggan Pelatihan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Pada tanggal 30 November 2023
- e. Koordinasi program dan kegiatan di Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI di Jakarta
- f. Rakorev dan Forum SKPD Dinas Kumperindag Provinsi dan Dinas Kumperindag Kabupaten / Kota di Jakarta

#### **Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian**

Jumlah pagu awal untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sejumlah Rp. 433.147.740,- kemudian terdapat revisi anggaran sebesar Rp. 41.992.000,- sehingga anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp. 391.155.740,- dengan realisasi sebesar Rp. 390.216.157,- atau 99.76 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik.

Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang, target 100 Dokumen, capaian 209 Dokumen Laporan Hasil Pengujian untuk 7 komoditi.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Jumlah pengujian komoditi sesuai standart dengan 556 kali pengujian dan 209 Laporan Hasil Pengujian
- b. Pengambilan sampel komoditi di kabupaten/kota
- c. Pemeliharaan alat laboratorium yaitu Reistall dan Short Training penggunaan Kromatografi Gas

- d. Penggantian Gas Clean Filter Oxygen dan Gas Clean Filter Moisture pada Kromatografi Gas
- e. Pengadaan Alat laboratorium yaitu Furnace untuk pengujian Kadar Abu
- f. Penyediaan bahan penunjang laboratorium pengujian
- g. Pengujian khusus untuk komoditi akreditasi sebagai komoditi ekport yaitu jagung dengan menerbitkan 9 SKM
- h. Fasilitasi Informasi Kandungan Gizi untuk UKM pangan olahan 44 Produk Pangan olahan untuk 34 UKM di kab/kota se provinsi gorontalo
- i. Pengolahan limbah laboratorium bekerja sama dengan PT. Mitra Hijau Asia.
- j. Mengikuti kegiatan Uji Banding antar Laboratorium, yaitu :
  - Uji banding beras yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Jambi pada bulan Februari 2023, dengan tujuan untuk memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi Laboratorium dalam bidang pengujian komoditi beras hasilnya satisfactory (sangat memuaskan).
  - Uji banding kakao dan kopi yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Sulsel pada tanggal 17 sd 18 juli 2023, dengan tujuan untuk memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi Laboratorium dalam bidang pengujian komoditi kopi dan kakao. Hasilnya satisfactory (sangat memuaskan).
  - Uji banding rumput laut yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Sulsel pada tanggal 17 sd 18 Juli 2023. Hasilnya satisfactory (sangat memuaskan)
- k. Mengikuti kegiatan temu pelanggan Balai BPMB Direktorat Standalitu tanggal 7 November 2023 di Bekasi Jawa Barat
- l. Magang PMB pengujian Mutu Beras di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian pada tanggal 3 sd 4 Agustus 2023 di Karawang Jawa Barat
  - Rakorev dan Forum OPD Dinas Kumperindag Provinsi dan Dinas Kumperindag Kabupaten / Kota yang dilaksanakan di Jakarta

#### **Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi**

Jumlah pagu awal untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sejumlah Rp. 142.617.000,- kemudian terdapat revisi anggaran sebesar Rp. 18.402.000,- sehingga anggaran

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp. 124.215.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 123.642.011,- atau 99.54 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik..

Ouput dari kegiatan ini adalah Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan, target 2 sertifikat dan capaian sebanyak 9 sertifikat kesesuaian mutu (SKM)

Output kegiatan ini adalah :

- a. Jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 9 SKM
- b. Sistem Manajemen Mutu melalui Kaji Ulang Manajemen, Audit Internal dan Kaji Ulang Dokumen
- c. Sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat yaitu media cetak dan televisi
- d. In House Training (IHT) SNI ISO 9001 : 2015 pada tanggal 30 Juli sd 1 Agustus 2023
- e. Partisipasi pada Bulan Mutu Nasional pada 15 November 2023 di Jakarta

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen**

Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi, dengan capaian 100 % yaitu 12 laporan pengawasan yang dilaksanakan di Kabupaten/kota. Pagu anggaran 2023 sebesar Rp. 103.993.044,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp. 103.892.260. adapun realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,90%

*Output kegiatan :*

- a. **Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan,** Lokasi Pengawasan se provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN)

Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/Kota dan lintas sektoral untuk melakukan pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, dan pengawasan kegiatan perdagangan baik ditingkat distributor maupun pengecer (toko-toko, pedagang-pedagang pasar tradisional, Swalayan, supermarket minimarket dan kios-kios) dengan tujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kuantitas barang beredar dan jasa serta memperkuat daya saing produk dalam negeri sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan

1. Untuk Barang :

- a. Standar
- b. Label dalam bahasa Indonesia
- c. Petunjuk Penggunaan
- d. Jaminan Layanan Purna Jual
- e. Cara Menjual
- f. Pengiklanan
- g. Kalusula Baku

2. Untuk Jasa :

- a. Standar
- b. Jaminan dan/ataugaransi yang di sepakati dan/atau di perjanjikan
- c. Kalusula Baku

3. Untuk Pengawasan Perdagangan Meliputi;

- a. Perizinan di bidang perdagangan
- b. Perdagangan Barang yang diawasi, di larang dan/atau diatur
- c. Diatribusi
- d. Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal inpor yang terkait dengan K3L (keamanan, keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup)
- e. Pemberlakuan SNI kualifikasi secara wajib
- f. Pendaftaran Gudang
- g. Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau penting
- h. Perdagangan melalui sistim elektronik

**Hasil Pengawasan barang Beredar dan atau/Jasa :**

1. Setrika listrik merek terbaru yang sudah standar nasional tetapi masih dibutuhkan pengujian.

2. Terdapatnya Besi, celokan, kabel, kipas angin yang belum sesuai dengan Standar Nasional dan masih terdapatnya barang yang tidak memiliki label harga pada barang yang diperdagangkan.
3. Masih banyak terdapat barang-barang kadaluarsa yang bercampur dengan barang-barang yang masih layak di konsumsi, berupa Biskuit, minuman dan bahan untuk pembuatan kue terdapat pada gudang-gudang di Kabupaten Gorontalo, toko di Kabupaten Boalemo serta Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara dan penyelesaiannya di dilaporkan ke BPOM dan diselesaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

**Pengawasan Perdagangan antara lain :**

1. Distribusi
  - a. Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi
    - Pola Distribusi dari Produsen
    - Distributor, Agen ke Pengecer.
    - Distribusi Barang
  - b. Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur.
    - Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya.
  - c. Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting.
2. Perijinan
  - Gudang-gudang (Tanda daftar Gudang, Siup, TDP, TDPUD, SIUP-MB)
3. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
  - Pasar rakyat
  - Pusat-pusat perbelanjaan
  - Toko swalayan
  - Gudang
  - Sarana perdagangan lainnya

**Hasil Pengawasan**

1. Masih terdapatnya penjualan minyak kita yang diatas harga Het misalnya di pasar-pasar tradisional
2. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak mempunyai tanda daftar gudang
3. Terdapatnya minuman beralkohol yang kadarnya 4.5% masih di jual di toko-toko tidak mempunyai ijin
4. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya

5. Distributor Minuman beralkohol yang izinnya sudah menghampiri (dalam proses penegakan Hukum oleh kepolisian )
6. Banyak sub pangkalan-pangkalan Gas LPG yang Nakal menjual Gas LPG sudah melebihi Harga HET,
7. Masih terdapatnya distributor besi yang menjual Besi Beton yang sudah mempunyai SNI namun ukuran panjang diameternya tidak sesuai dengan ukuran yang di janjikan.

**Tabel.3.13. REKAP TOTAL DATA PENGAWASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PROVINSI GORONTALO, Tahun 2023**

| NO | URAIAN (KATEGORI TEMUAN) | JUMLAH     | PROSES HUKUM                     | PEMBINAAN  | KETERANGAN   |
|----|--------------------------|------------|----------------------------------|------------|--|
|    | - KASUS ALAT UKUR UTTP   | 15         | PEMBINAAN                        | 15         | liter/Timbangan (Pasar2 Tradisional) (diserahkan Di Kab/Kota)  |
|    | SNI (Wajib)              | 15         | PEMBINAAN                        | 15         | Mainan anak  |
|    |                          | 5          | PEMBINAAN                        | 5          | Tusuk Kontak   |
|    |                          | 10         | PEMBINAAN                        | 10         | Kabel Lisrik   |
|    | Harga Pada Barang        | 60         | PEMBINAAN                        | 60         | Tidak adanya label Harga Pada barang yang di Perdagangkan di Kab-Kota. Perbedaan Harga pada pajangan dan kasir |
|    | Harga Barang             | 25         | PEMBINAAN                        | 25         | Di jual tidak sesuai dengan Harga HET  |
|    | Minyak Goreng Curah      | 15         | PEMBINAAN                        | 5          |  |
|    | -KADALUARSA              | 55         | PEMBINAAN<br>Diserahkan ke B'POM | 55         | Kab/Kota<br>Di serahkan Ke B'POM   |
|    | <b>JUMLAH TEMUAN</b>     | <b>200</b> |                                  | <b>200</b> |  |

## B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2023, Dinas Kumperindag mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 53.980.687.812,-** anggaran ini sudah termasuk gaji, tunjangan ASN dan DAK non fisik, APBD-P serta anggaran yang bersumber dari DID. Di tahun 2023 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo mendapat anggaran sebesar Rp. 29.716.135.532,- melakukan revisi pada beberapa program kegiatan yang bersesuaian, dengan total sebesar Rp. 277.650.780,- Adapun anggaran APBD-P tahun 2023 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 12.401.260.000,- kemudian tambahan anggaran melalui sumber dana DID Kinerja Sisa IF TA. 2022 sebesar Rp. 633.025.000,- DID Kinerja Tahun berjalan Inflasi 1 senilai Ro. 3.963.421.000,- IF Tahun Berjalan Inflasi 3 Rp. 5.055.630.500,- serta pergeseran antar OPD/BTT = Rp. 1.933.565.000,- Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 50.144.137.080,- Adapun uraian penjelasannya sebagai berikut:

1. Pagu dan Anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan TA. 2023, dengan rincian sebagai berikut :

### **Pagu dan realisasi Dinas Kumperindag TA. 2023 (sumber dana APBD)**

#### *Pagu Tahun Anggaran 2023*

|                          |       |                             |
|--------------------------|-------|-----------------------------|
| ▪ <b>Belanja Operasi</b> |       | <b>Rp. 42.395.046.312,-</b> |
| Belanja Pegawai          | : Rp. | 9.477.231.693,-             |
| Belanja Barang & Jasa    | : Rp. | 32.370.254.619              |
| ▪ <b>Belanja Modal</b>   | : Rp. | <b>547.560.000</b>          |

#### *Realisasi Anggaran :*

|                          |       |                               |
|--------------------------|-------|-------------------------------|
| ▪ <b>Belanja Operasi</b> |       | <b>: Rp. 42.212.998.444,-</b> |
| Belanja Pegawai          | : Rp. | 9.184.737.481                 |
| Belanja Barang & Jasa    | : Rp. | 32.484.285.652                |
| ▪ <b>Belanja Modal</b>   | : Rp. | <b>543.975.311</b>            |

Anggaran Dinas Kumperindag TA. 2023 (sumber dana DID Kinerja Sisa IF TA. 2023, DID Kinerja Tahun berjalan Inflasi 1, DIF Periode 3 serta pergeseran antar OPD/BTT)

#### *Anggaran Tahun 2023*

|                          |       |                               |
|--------------------------|-------|-------------------------------|
| ▪ <b>Belanja Operasi</b> |       | <b>: Rp. 11.585.641.500,-</b> |
| Belanja Pegawai          | : Rp. | -                             |
| Belanja Barang & Jasa    | : Rp. | 11.585.641.500                |
| ▪ <b>Belanja Modal</b>   | : Rp. | -                             |

✚ *Realisasi Anggaran :*

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| ▪ <b>Belanja Operasi</b> | <b>: Rp. 7.931.138.636</b> |
| Belanja Pegawai          | : Rp. -                    |
| Belanja Barang & Jasa    | : Rp. 7.931.138.636        |
| ▪ <b>Belanja Modal</b>   | <b>: Rp. -</b>             |

Sehingga total anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 melalui sumber dana APBD dan DID :

✚ *Pagu Tahun Anggaran 2023*

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| ▪ <b>Belanja Operasi</b> | <b>: Rp. 53.980.687.812,-</b> |
| Belanja Pegawai          | : Rp. 9.477.231.693           |
| Belanja Barang & Jasa    | : Rp. 43.955.896.119,-        |
| ▪ <b>Belanja Modal</b>   | <b>: Rp. 547.560.000</b>      |

✚ *Realisasi Anggaran :*

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| ▪ <b>Belanja Operasi</b> | <b>: Rp. 50.144.137.080,-</b> |
| Belanja Pegawai          | : Rp. 9.184.737.481           |
| Belanja Barang & Jasa    | : Rp. 40.415.424.288,-        |
| <b>Belanja Modal</b>     | <b>: Rp. 543.975.311</b>      |

Realisasi Keuangan sebesar 92,89% dan realisasi fisik 96,81% dengan sisa anggaran Rp. 3.836.550.732,- telah kembali ke Kas Daerah. Sisa anggaran ini terdiri dari :

- Sisa dari 28 sub kegiatan Rp. 356.122.638,-,-
- Sisa belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp. 292.494.212,-
- Pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting, sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi terdapat Sisa DID Periode 3 Pengendalian Inflasi item Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan belanja pendukung pelaksanaan operasi pasar yang tidak terealisasi hingga 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp. 3.187.933.882,- karena rentang waktu pertanggungjawaban kegiatan yang terbatas pada tahun anggaran 2023.

Adapun total alokasi anggaran belanja langsung tersebut, antara lain diperuntukkan untuk pencapaian 5 (lima) sasaran strategis utama yang terdapat pada Perjanjian Kinerja

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2023

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                        | KINERJA |           |                    | ANGGARAN (Rp)         |                       |                      |
|---|--|---------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   |  | Target  | Realisasi | Capaian Output (%) | Pagu (Rp)             | Realisasi (Rp).       | Capaian Keuangan (%) |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan                         | Nilai SAKIP                                    | 100     | 100       | 100                | 4.562.883.948         | 4.481.412.953         | 98,21                |
| Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) | Jumlah Koperasi Berkualitas                    | 100     | 100       | 100                | 931.636.500           | 931.113.036           | 99,94                |
|   | Jumlah UKM yang berdaya saing                  | 100     | 100       | 100                | 17.055.759.100        | 17.009.777.545        | 99,73                |
| Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) | Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah | 100     | 99,95     | 99,95              | 3.500.429.405         | 3.474.657.903         | 99,26                |
| Meningkatnya nilai ekspor (USD)                               | Jumlah Nilai Ekspor                            | 100     | 95,43     | 95,43              | 16.431.164.166        | 13.065.666.097        | 79,52                |
| <b>Dana APBD</b>  |  |         |           |                    | <b>42.481.873.119</b> | <b>38.962.627.534</b> | <b>91,72</b>         |
| <b>Dana DAK Non Fisik</b>                                     |  |         |           |                    | <b>2.021.583.000</b>  | <b>1.996.772.065</b>  | <b>98,77</b>         |
| <b>Jumlah Belanja Barang &amp; Jasa</b>                       |  |         |           |                    | <b>44.503.456.119</b> | <b>40.959.399.599</b> | <b>92,04</b>         |
| <b>Belanja Pegawai</b>  |  |         |           |                    | <b>9.477.231.693</b>  | <b>9.184.737.481</b>  | <b>96,91</b>         |
| <b>Total Belanja</b>  |  |         |           |                    | <b>53.980.687.812</b> | <b>50.144.137.080</b> | <b>92,89</b>         |

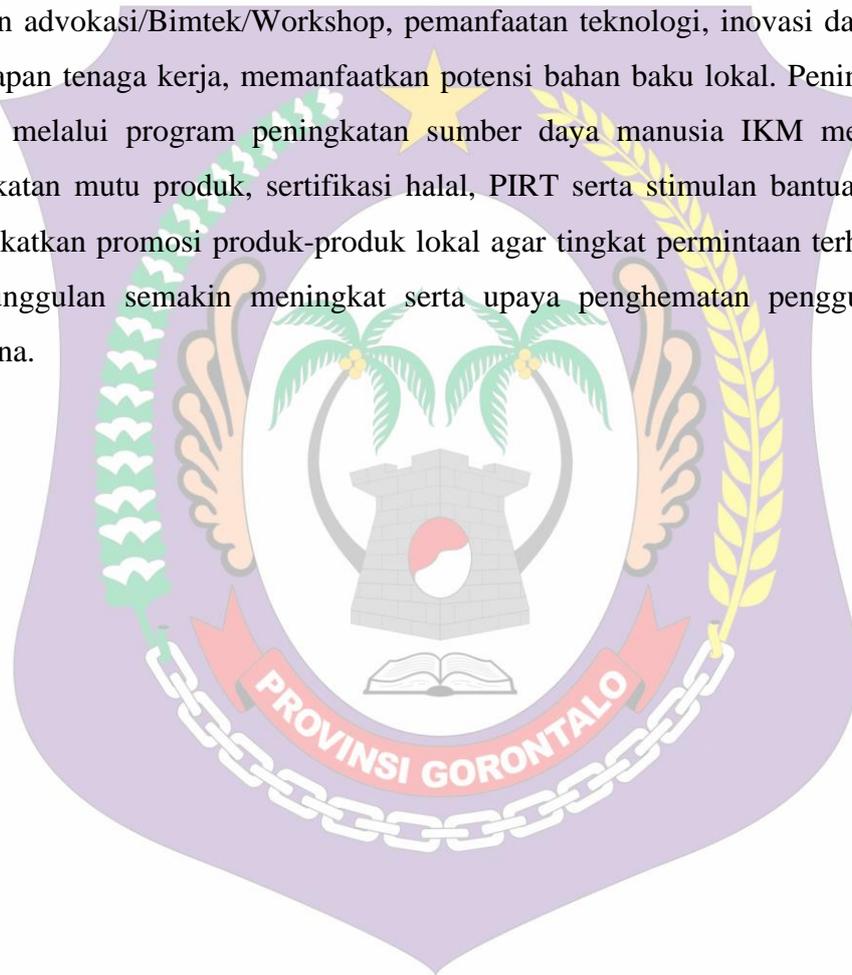
Analisis Efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 15. Analisis Efisiensi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                        | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi |
|---|--|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan                         | Nilai SAKIP                                    | 100                 | 98,21                   | 1,79              |
| Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) | Jumlah Koperasi Berkualitas                    | 100                 | 99,94                   | 0,06              |
|   | Jumlah UKM yang berdaya saing                  | 100                 | 99,73                   | 0,27              |
| Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) | Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah | 99,95               | 99,26                   | 0,69              |
| Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)                               | Jumlah Nilai Ekspor                            | 95,43               | 79,52                   | 15,91             |

pada tabel 3.16 diatas terlihat bahwa kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag terdapat tingkat efisiensi terbesar pada nilai 15,91% hal ini karena adanya sisa anggaran DID Periode 3 tahun 2023 pada Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan belanja pendukung pelaksanaan operasi pasar yang tidak terealisasi

hingga 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp. 3.187.933.882,- karena rentang waktu pertanggungjawaban kegiatan yang terbatas pada tahun anggaran 2023. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran pada sektor koperasi UKM perindustrian dan perdagangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan perkoperasian yang diberikan secara berkala kepada setiap koperasi yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo, pembinaan dan pendampingan kepada UKM melalui coaching clinic dan mentoring bagi UMKM, stimulan bagi UMKM, Peningkatan SDM bagi pelaku UMKM melalui E-commerce, marketplace. Peningkatan kualitas dan kontinuitas UMKM melalui kegiatan advokasi/Bimtek/Workshop, pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas, penyerapan tenaga kerja, memanfaatkan potensi bahan baku lokal. Peningkatan mutu produk melalui program peningkatan sumber daya manusia IKM melalui bimtek peningkatan mutu produk, sertifikasi halal, PIRT serta stimulan bantuan bagi IKM, meningkatkan promosi produk-produk lokal agar tingkat permintaan terhadap produk lokal unggulan semakin meningkat serta upaya penghematan penggunaan sarana prasarana.



## PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2023 memuat laporan perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan selama kurun waktu tahun 2023.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan dalam ketersediaan anggaran dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Hasil yang telah dicapai di tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan dari Pimpinan (Gubernur) Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan uraian - uraian yang disampaikan diperoleh bahwa kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo di Tahun 2023 adapat dilihat dari capaian sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan  
Indikator Kinerja I : Nilai SAKIP  
Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU I ini sebesar Rp. 4.562.883.948,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.481.412.953,- atau sebesar 98,21 % keuangan dan tingkat efisiensi 1,79%, Target kinerja 100 % dan capaian 100 %.  
(jumlah anggaran ini belum Belanja Pegawai **Rp. 9.477.231.693**)
2. Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)  
Indikator Kinerja II : Jumlah Koperasi Berkualitas  
Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU II ini sebesar Rp. 931.636.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 931.113.036,- atau sebesar 99,94% keuangan dan tingkat efisiensi 0,27%. Target kinerja 100 % (20 koperasi) dan capaian 100%.  
(jumlah anggaran ini belum termasuk DAK Non Fisik Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan KUKM)

Indikator Kinerja III : Jumlah UKM yang Berdaya Saing

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU III ini sebesar Rp. 17.055.759.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.009.777.545,- atau sebesar 99,73% keuangan dan tingkat efisiensi 0,35%. Target kinerja 100 % dan capaian 100%.

*(jumlah anggaran ini belum termasuk DAK Non Fisik Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan KUKM)*

3. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)

Indikator Kinerja III : Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU IV ini sebesar Rp. 3.500.429.405 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.474.657.903,- atau sebesar 99,26 % keuangan dan tingkat efisiensi 0,69%

Target kinerja 100% dan capaian 99,95% IKM

4. Meningkatnya nilai ekspor (USD)

Indikator Kinerja V : Jumlah Nilai Ekspor

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU V ini sebesar Rp. 16.431.164.166,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.065.666.097,- atau sebesar 779,52 % keuangan dan tingkat efisiensi 15,91 %

Target kinerja 100% dan capaian 95,43%

Jumlah anggaran dan realisasi ini tidak termasuk DAK Non Fisik Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan KUKM sebesar Rp. **2.021.583.000,-** dan Belanja Pegawai sebesar **Rp. 9.477.231.693**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan rencana. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

Pencapaian target kegiatan dan sasaran tahun 2023 tidak hanya bersumber dari pendanaan APBD juga didukung oleh dana Dekonsentrasi. Di tahun 2023 kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan khususnya dalam pencapaian indikator program pada Renstra 2023-2026.

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja, pemanfaatan sumber dana yang tersedia semaksimal mungkin serta pemanfaatan kemampuan aparatur.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Masih banyak kendala dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian baik oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun Dinas Kumperindag

sendiri, antara lain proporsi anggaran pembangunan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun dirasakan sangat terbatas, mengingat dinas ini mengemban peranan dan fungsi strategis dalam upaya menggerakkan sektor riil, yang meliputi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM) dan pelaku usaha, sehingga memerlukan pendanaan yang memadai serta fasilitas berupa sarana prasarana kerja yang mendukung.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 telah diupayakan untuk dilaksanakan dengan optimal, jika masih terdapat kekurangan yang bersifat administratif maupun substantif kami mohon saran dan masukan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

The logo of the Province of Gorontalo is a shield-shaped emblem. It features a central white circle containing two palm trees, a grey stone tower with a red and white dome, and an open book. The shield is surrounded by a green and white chain-like border on the left and a yellow laurel wreath on the right. A yellow star is positioned at the top center of the shield. The background of the shield is purple.

Gorontalo, Februari 2023  
Kepala Dinas Kumperindag  
Provinsi Gorontalo

**RISJON SUNGE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196909241989021001